

**PERBANDINGAN PERSEPSI ANTARA KELOMPOK AUDITOR  
INTERNAL, AKUNTAN PUBLIK, DAN AUDITOR PEMERINTAH  
TERHADAP PENUGASAN AUDIT KECURANGAN (*FRAUD AUDIT*)  
DAN PROFIL AUDITOR KECURANGAN (*FRAUD AUDITOR*)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi



Nama : Eman Sukanto  
NIM : C4C004214

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**Tesis berjudul**

**PERBANDINGAN PERSEPSI ANTARA KELOMPOK AUDITOR  
INTERNAL, AKUNTAN PUBLIK, DAN AUDITOR PEMERINTAH  
TERHADAP PENUGASAN AUDIT KECURANGAN (*FRAUD AUDIT*)  
DAN PROFIL AUDITOR KECURANGAN (*FRAUD AUDITOR*)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh  
Eman Sukanto

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 September 2007  
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing**

Pembimbing Utama/Ketua

Pembimbing/Anggota

Drs. Rahardja M.Si, Akt

Drs. Daljono M.Si, Akt

**Tim Penguji**

Dr. Jaka Isgiyarta, MSi Akt.

Drs. Agus Purwanto, MSi, Akt

Dra. Indira J, MSi. Akt

Semarang, 11 September 2007  
Universitas Diponegoro  
Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Akuntansi  
Ketua Program

Dr. Mohamad Nasir, M.Si, Akt  
NIP. 131 875 458

## Motto

*Cara terbaik dalam menghadapi situasi darurat dan kepura-puraan, adalah kembali pada prinsip utama dan tindakan yang sederhana.*

Winston Churchill

*Seseorang tidak mendapatkan dari apa yang dia harapkan, tetapi dari apa yang dia kerjakan.*

Abdullah Gymnastiar

## Persembahan

*Tesis ini saya persembahkan kepada saudara-saudaraku di daerah-daerah terpencil, namun memberi harapan dan makna yang luar biasa terhadap Negeri tercinta.*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang diacu dalam naskah ini secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Agustus 2007

Eman Sukanto

## ABSTRACT

The Fraud scheme that is happened in the government and commercial entity has a bad influence to the economic system and harmful to the stakeholders. A professional auditor as the locomotive to move good corporate governance and as a goalkeeper to prevent fraudulence has a great role to create a healthy and accountable economic system. Recent years, there are significant changes in the auditor profession. The change influenced by regulatory from foreign or domestic, directly or indirectly, demand higher requirement in the auditor's work system.

Internal auditor, public accountant, or government auditor relatively different in organization structural, employment status, job assignment, and guidance used in the audit. However, their work is essentially the same, that is giving sufficient "to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether caused by error or fraud" to plan and perform the audit to obtain , whether caused by error or fraud". This study held to asses and analyze the perception of internal auditor, external auditor, and governmental auditor to the fraud audit and the profile of the fraud auditor when they conducted the examination duty.

Sampling technique used the purposive sampling. There are 153 respondents, 33 internal auditors work in business entity, 66 external auditors work in the Public Accountant Office and 54 government auditors work in BPK. To examine the hypothesis, this study used one way Anova.

The result that there is no different perception between internal auditor, external auditor and government auditor to the Fraud Audit and profile of The Fraud Auditor. Averaged perceptions they have were high. This shows that the three groups of auditor all have strong willingness to prevent, detect, and investigate fraud.

*Key words : Internal auditor, external auditor, government auditor, fraud audit, fraud auditor.*

## Abstraksi

*Fraud scheme* yang terjadi di entitas pemerintah maupun komersial memiliki dampak buruk terhadap sistem perekonomian dan sangat merugikan *stakeholders*. Profesi auditor sebagai lokomotif dalam menggerakkan *good corporate governance* dan penjaga gawang dalam mencegah tindak kecurangan, memiliki andil yang besar dalam menciptakan tatanan ekonomi yang sehat dan akuntabel. Beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang signifikan terhadap profesi auditor. Perubahan tersebut dipengaruhi regulasi dari luar maupun dalam negeri dimana secara langsung maupun tidak langsung, menuntut persyaratan yang lebih tinggi terhadap sistem kerja auditor. Auditor internal, auditor eksternal maupun auditor pemerintah secara struktur organisasi, status pegawai, lingkup pekerjaan, serta pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan audit relatif berbeda, namun secara esensi tugas mereka sama yakni memberi keyakinan memadamahi bahwa laporan yang diaudit bebas dari salah saji material yang disebabkan kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*). Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis persepsi kelompok auditor internal, akuntan publik, dan auditor pemerintah terhadap penugasan audit kecurangan (*fraud audit*) dan profil auditor kecurangan (*fraud auditor*).

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Responden terdiri dari 33 auditor internal yang bekerja di beberapa perusahaan besar, 66 auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik, serta 54 auditor pemerintah yang bekerja di BPK. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik one way Anova.

Hasilnya menyatakan tidak ada perbedaan persepsi antara auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah terhadap tugas audit kecurangan (*fraud audit*) dan profil auditor kecurangan (*fraud auditor*). Rata-rata tingkat persepsi yang mereka miliki tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok auditor sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkap *fraud* pada entitas yang sedang mereka audit dan ingin menjadi *fraud auditor* saat menjalankan tugas pemeriksaan.

*Kata kunci: Auditor internal, auditor eksternal, auditor pemerintah, fraud audit, fraud auditor*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Perbandingan Persepsi antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik dan Auditor Pemerintah terhadap Tugas *Fraud Audit* dan Profil *Fraud Auditor*”. Penulisan Tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan, bantuan, serta doanya kepada semua pihak selama penyusunan Tesis ini. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhamad Nasir, MSi, Akt selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. H. Chabachib, MSi, Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. H. Rahardja, MSi, Akt selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan dan waktu yang diberikan selama ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. Daljono, MSi, Akt selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan dan waktu yang diluangkan selama ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Simon Harto Budi dan Bapak Sebastian Harno Budi, atasan penulis di tempat kerja, atas dukungan dan ijinnya untuk mengikuti kuliah di pascasarjana Universitas Diponegoro.
6. Segenap dosen Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, atas ilmu yang diajarkan sehingga tertuang dalam penulisan Tesis ini.

7. Para Pimpinan dan auditor di perusahaan, Kantor Akuntan Publik, dan Badan Pemeriksa Keuangan atas bantuan surveynya.
8. Istriku, Arlinda Juliati serta Fardan, Lala dan Rere, ketiga anakku yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu, atas kesabaran dan dukungan yang luar biasa. Mereka sering “protes” karena sering kehilangan waktu bersama bapaknya.
9. Orang tua dan mertua, terima kasih doa dan wejangan-wejangannya, sehingga penulis selalu sabar dan berbesar hati dalam melakukan tugas kerja sekaligus menyelesaikan kuliah.
10. Rekan-rekan “seperjuangan” di tempat kuliah maupun di kantor atas dukungan moril dan dorongan semangatnya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan tesis ini.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Penulis minta maaf atas kekurangan, dan ketidaksempurnaan selama proses pembuatan dan hasil tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memiliki andil dalam pengembangan ilmu akuntansi di Tanah Air.

Semarang, 17 Agustus 2007

Eman Sukanto



## DAFTAR ISI

Judul.....	i
Halaman Pengesahan Tesis .....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Abstract .....	v
Abstraksi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv

Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

### BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Persepsi Auditor.....	10
2.2 Kelompok Auditor dan Jenis Penugasannya.....	14
2.3 <i>Fraud</i> .....	19
2.3.1 Motif dan Indikator <i>Fraud</i> .....	21
2.3.2 Faktor-Faktor Resiko Kecurangan ( <i>Fraud Risk Factors</i> )..	22

2.3.3	Pengelompokan <i>Fraud</i> .....	25
2.3.4	Tindakan <i>Fraud</i> di Entitas Komersial.....	28
2.3.5	Tindakan <i>Fraud</i> di Entitas Pemerintah.....	32
2.4	Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	35
2.5	Pengidentifikasian dan Teknik Auditor Mengungkap <i>Fraud</i> .....	36
2.5.1	Identifikasi <i>Fraud</i> .....	36
2.5.2	Teknik Auditor Mengungkap <i>Fraud</i> .....	38
2.5.3	Investigasi.....	42
2.6	<i>Good Governance</i> dan <i>Sarbanes-Oxley Act</i> 2002 .....	44
2.7	Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Entitas.....	47
2.8	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis.....	48
2.9	Penelitian Terdahulu.....	49

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

3.1	Unit Analisis.....	53
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3	Populasi dan Sampel.....	53
3.3.1	Populasi.....	53
3.3.2	Sampel.....	54
3.4	Prosedur Pengumpulan Data.....	55
3.5	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	56
3.7	Teknik Analisis Data.....	57
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	57

3.7.2 Uji Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas).....	57
3.7.3 Uji Normalitas.....	59
3.7.4 Analisis Data Pengujian Hipotesis.....	59
3.8 Sistematika Pembahasan.....	60

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Statistik Deskriptif.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	61
4.1.2 Pengiriman dan Pengembalian kuesoner.....	63
4.2 Uji Kualitas Data.....	68
4.3 Pengujian Hipotesis.....	69
4.3.1 Hasil Uji Hipotesis Satu.....	71
4.3.2 Hasil Uji Hipotesis Dua.....	72
4.4 Ukuran Persepsi Auditor dan Analisis Faktor yang Mempengaruhi.....	73
4.5 Pembahasan.....	75

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Implikasi Teoritis.....	82
5.3 Implikasi Praktek.....	83
5.4 Keterbatasan.....	84
5.5 Agenda Penelitian Mendatang.....	85
Daftar Pustaka.....	86

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Hal-Hal yang Mempengaruhi Persepsi Auditor terhadap <i>Fraud</i> dari Sisi Internal .....	12
Tabel 2.2	Hal-Hal yang Mempengaruhi Persepsi Auditor terhadap <i>Fraud</i> dari Sisi Eksternal .....	13
Tabel 2.3	Perbedaan Auditor Internal, Akuntan Publik dan Pemerintah...	17
Tabel 2.4	Organisasi <i>Auditee</i> dan Auditor Pelaksana.....	18
Tabel 2.5	Jenis, Pelaku dan Korban Kecurangan.....	23
Tabel 2.6	Perbedaan <i>Fraud</i> Laporan Keuangan dan Penyalahgunaan Aset	28
Tabel 2.7	Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan dengan <i>Fraud</i> , <i>Fraud Audit</i> dan <i>Fraud Auditor</i> .....	50
Tabel 3.1	Variabel dan Indikator <i>Fraud Audit</i> dan <i>Fraud Auditor</i> .....	58
Tabel 4.1	Profil Responden.....	62
Tabel 4.2	Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Terhadap Responden.....	64
Tabel 4.3	Rincian Sampel dan <i>Response</i> Kuesioner Kelompok Auditor Internal.....	65
Tabel 4.4	Rincian Sampel dan <i>Respose</i> Kuesioner Auditor Eksternal .....	66
Tabel 4.5	Rincian Sampel dan <i>Respose</i> Kuesioner Auditor Pemerintah.....	67
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas.....	69
Tabel 4.8	Data Pengujian Hipotesis .....	70
Tabel 4.9	Uji <i>One Way Anova</i> Persepsi Auditor terhadap Penugasan <i>Fraud Audit</i> .....	70
Tabel 4.10	Uji <i>One Way Anova</i> Persepsi Auditor terhadap Profil <i>Fraud Auditor</i> .....	71

Tabel 4.11	Nilai Persepsi Auditor terhadap Indikator Fraud Audit.....	73
Tabel 4.12	Nilai Persepsi Auditor terhadap Indikator Fraud Audit.....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner

Rangkuman Jawaban Responden

Hasil Uji Reliabilitas *Fraud Audit*

Hasil Uji Reliabilitas *Fraud Auditor*

Hasil Uji Validitas *Fraud Auditor*

Hasil Uji Validitas *Fraud Audit*

Grafik Rata-Rata Jawaban Kuesioner Fraud Auditor (Skala Liker 1-10)

Grafik Rata-Rata Jawaban Kuesioner Fraud Audit (Skala Liker 1-10)

Sarbanes-Oxley Act 2002

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

RUU Akuntan Publik

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

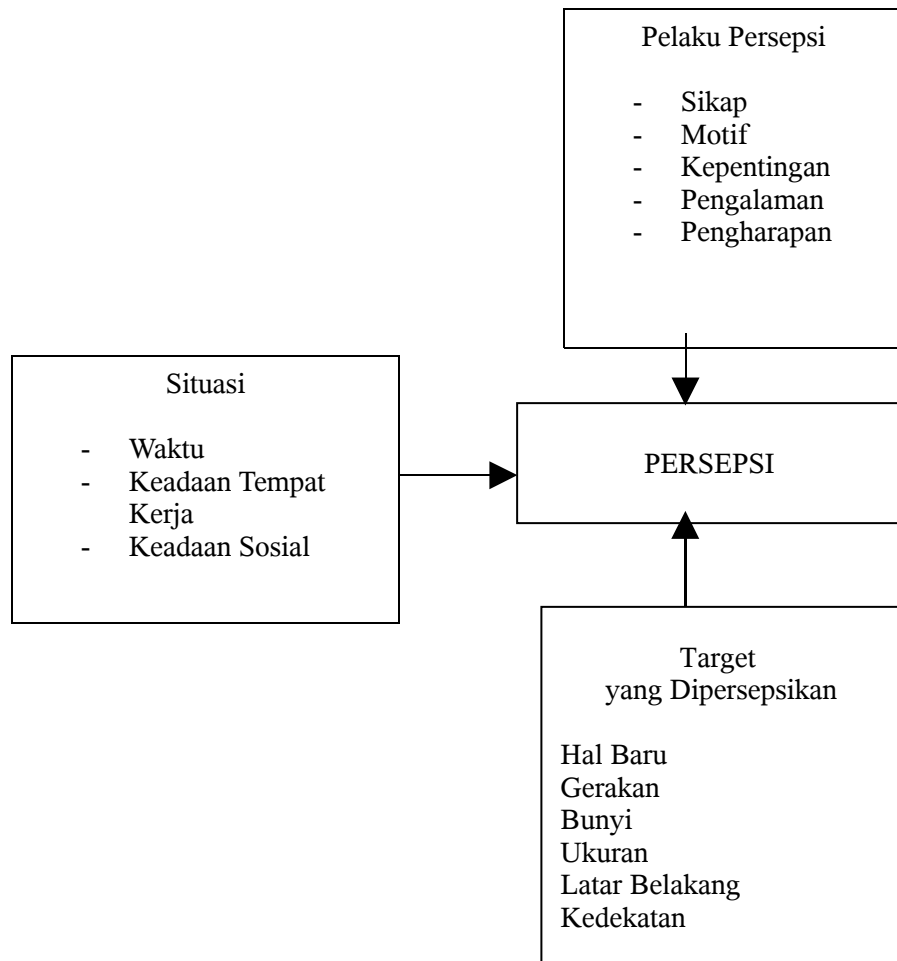
#### 2.1 Persepsi Auditor

Persepsi menurut Robbins (2005) adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Namun demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan objektif. Persepsi berhubungan dengan sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan evaluasi baik positif maupun negatif mengenai objek, orang atau peristiwa. Komponen dari sikap adalah *cognition*, *affect* dan *behavior*. Dari ketiga komponen tersebut, komponen yang berkaitan dengan persepsi adalah komponen *cognition* dan *affect*. Komponen kognitif merupakan segmen pendapat atau keyakinan, sedangkan afeksi merupakan segmen perasaan atau emosional.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni pelaku persepsi, target yang dipersepsikan dan ketiga adalah situasi. Jika digambarkan polanya, seperti terlihat pada gambar 2.1. Ketika individu memandang kepada objek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu pelaku persepsi itu. Diantara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, kepribadian, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan harapan.

Gambar 2.1.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Menurut Robbin



*Sumber: Robbins (2005)*

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi dua yaitu faktor eksternal atau dari luar yakni *concreteness*, yaitu gagasan yang abstrak yang sulit dibandingkan dengan yang objektif, *novelty* atau hal baru, biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan daripada hal-hal lama, *velocity* atau percepatan, misalnya pemikiran atau gerakan yang lebih cepat dalam menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibanding yang



lambat, *conditioned stimuli*, yakni stimulus yang dikondisikan. Sedangkan faktor-faktor internal adalah, motivasi yaitu dorongan untuk merespon sesuatu, *interest* dimana hal-hal yang menarik lebih diperhatikan daripada yang tidak menarik, *need* adalah kebutuhan akan hal-hal tertentu dan terakhir *asumptions* yakni persepsi seseorang dipengaruhi dari pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain. Tabel 2.1 dan 2.2 memberikan rincian pengaruh-pengaruh dari sisi internal maupun eksternal para auditor terhadap *fraud* maupun hal-hal yang berhubungan dengan *fraud*.

Tabel 2.1  
Hal-Hal yang Mempengaruhi Persepsi Auditor  
terhadap *Fraud* dari Sisi Internal

Dimiliki Pelaku Persepsi	Tentang Fraud dan Seputar Pemeriksaan
Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki idealisme / tidak</li> <li>- Independen / tidak independen</li> <li>- Menolak / mentoleransi <i>fraud</i></li> <li>- Peduli terhadap <i>fraud</i> / tidak peduli</li> </ul>
Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki beban terhadap klien / tidak.</li> <li>- Jangka pendek / panjang</li> <li>- Ingin menciptakan <i>GSG</i> / tidak</li> <li>- Kepentingan pribadi</li> </ul>
Motif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingin berprestasi sebagai auditor handal /tidak</li> <li>- Puas / tidak puas jika mencegah <i>fraud</i></li> <li>- Tidak mampu mendeteksi &amp; mengungkap <i>fraud</i> berarti gagal / biasa saja</li> </ul>
Pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal dan non formal auditor</li> <li>- Pernah mengungkap <i>fraud</i> /tidak</li> <li>- Pernah merasakan dampak <i>fraud</i> / tidak</li> <li>- Pernah diberi sanksi karena gagal atau lalai / tidak</li> <li>- Pernah disuap pelaku <i>fraud</i> / tidak</li> </ul>
Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem perekonomian bersih dan akuntabel / tidak</li> <li>- Ingin entitas maju / tidak</li> <li>- Harga saham naik / tidak</li> <li>- Kesejahteraan pegawai meningkat / tidak</li> </ul>

Sumber: Dari berbagai diolah 2007

Tabel 2.2  
Hal-Hal yang Mempengaruhi Persepsi Auditor

terhadap *Fraud* dari Sisi Eksternal

Pengaruh dari	Faktor yang Mempengaruhi
Regulasi / Regulator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode etik</li> <li>- Standar akuntansi</li> <li>- Standar audit</li> <li>- Undang-undang / peraturan lain</li> <li>- Kebijakan pemerintah / otoritas</li> <li>- Kebijakan asosiasi / organisasi</li> </ul>
Auditee / Klien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap &amp; integritas manajemen</li> <li>- Struktur pengendalian</li> <li>- Jenis dan ukuran organisasi entitas</li> <li>- Budaya pegawai / organisasi</li> <li>- Visi, misi dan tujuan entitas</li> <li>- Teknologi yang digunakan entitas</li> </ul>
Kondisi Sosial / Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat persaingan</li> <li>- Kemampuan ekonomi masyarakat</li> <li>- Ketaatan terhadap sistem hukum</li> <li>- Sistem ekonomi nasional / global</li> <li>- Perkembangan teknologi</li> </ul>

*Sumber: Dari berbagai diolah 2007*

Merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang dikemukakan Robbins, pelaku persepsi dalam penelitian ini adalah auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah. Dengan latar belakang sikap, kepentingan, motivasi, pengalaman, pengharapan, selama melaksanakan tugas pemeriksaan, serta pengaruh dari luar, tiap auditor memiliki persepsi yang sama atau berbeda terhadap suatu objek yaitu penugasan *fraud audit* dan profil *fraud auditor* saat mereka menjalankan tugas pemeriksaan.

## 2.2 Kelompok Auditor dan Jenis Penugasannya

### Tiga Kelompok Auditor Keuangan

Secara umum terdapat 4 jenis auditor yang berhubungan dengan audit keuangan, yaitu internal audit, audit independen atau akuntan publik, auditor pemerintah atau auditor PNS dan auditor pajak yang memiliki tugas sangat spesifik menyangkut pemeriksaan pajak. Auditor pemerintah sebenarnya bisa masuk kelompok auditor internal maupun eksternal, karena undang-undang memang mengatur demikian, dimana BPK auditor eksternal, sedangkan BPKP, Irjen dan Bawasda adalah auditor internal. Dalam penelitian ini, akan membahas kelompok auditor beserta penugasannya, yakni auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah.

a. Auditor Internal

Definisi internal audit menurut *the Institute of Internal Auditors* (1991) adalah:

*Internal audit is an independent, objective assurance and consulting activity that adds value to and improves organization's operation. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.*

Internal auditing merupakan suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan akuntansi perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya untuk membantu manajemen melaksanakan tanggungjawab dengan memberi analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit

Menurut Hery (2005) internal audit berkembang sebagai salah satu cara perusahaan untuk mengatasi tingginya resiko akibat semakin pesatnya persaingan dan *economic turbulence* yang sulit diprediksi. Hiro (2002) dalam Hery (2005) mengatakan jasa

audit internal yang berkualitas akan berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perusahaan. Diaz (2002) dalam Hery (2005) melakukan penelitian mengenai peran akuntan perusahaan terhadap *good corporate governance*, menyimpulkan bahwa auditor internal sangat berperan dalam membantu manajemen dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan, serta mengurangi kecurangan.

b. Akuntan publik

Adalah pihak yang memberikan jasa pemeriksaan kepada pemegang saham perusahaan dan bukan merupakan karyawan perusahaan. Akuntan publik memiliki pedoman baku dalam tugas pemeriksaan yakni Standar Profesional Akuntan Publik. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar ditetapkan oleh IAI tersebut. Sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta (*in facts*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Anggota KAP juga harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

c. Auditor pemerintah

Auditor pemerintah atau nama resminya Pejabat Fungsional Auditor berdasarkan Kepmenpan No. 19 tahun 1996 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi auditor pemerintah atau pejabat fungsional auditor ada pada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Inspektorat Jendral Departemen (Irjen)
4. Inspektorat Utama Lembaga Non Departemen
5. Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Bawasda), dan saat ini ditambah satu komisi bersifat khusus dan *ad hoc* yakni
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perbedaan antara auditor internal, akuntan publik, dan auditor pemerintah mulai dari status kepegawaian, penugasan dan lain-lain dapat dilihat di tabel 2.3. Sedangkan Matrik yang menjelaskan organisasi *auditee* dengan auditor yang melakukan audit, tertera dalam tabel 2.4.

### **Jenis-Jenis Penugasan Auditor**

Jenis penugasan audit dapat dibagi menjadi tiga yaitu: audit laporan keuangan (*financial audit*), audit operasional (*operational audit*), dan audit ketaatan (*compliance audit*). Audit laporan keuangan merupakan audit terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan. Dalam jenis ini, auditor bertanggung jawab dalam memberikan opini standar apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang bersifat material. Audit operasional merupakan audit yang dilakukan terhadap satu proses dalam entitas ekonomi untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari proses tersebut. Jenis audit ini, auditor memberikan opini non standar serta rekomendasi tentang proses yang diauditnya, apakah sudah efektif dan efisien atau belum.

Tabel 2.3  
Perbedaan Auditor Internal, Akuntan Publik dan Pemerintah

Perbedaan	Auditor Internal	Akuntan Publik	Auditor Pemerintah
Status Pegawai	Karyawan Perusahaan	Profesi (Independen)	Pegawai Negeri Sipil
Penanggung Jawab Tertinggi	Presiden Direktur/ CEO Perusahaan	<i>Partner Accountant</i> KAP	Kepala BPK / BPKP Inspektur Jenderal, Ka. Bawasda
Pemberi Gaji/Komisi	Perusahaan	Klien	Negara
Pekerjaan Utama	Audit Kinerja Audit Kecurangan Audit Keuangan Menjaga Aset	<i>General Audit &amp;</i> Pemberian Opini. Audit Khusus	Audit APBN/APBD, Audit Kecurangan, Audit Keuangan, Menjaga Aset,
Pedoman Kerja Audit	<i>Standard Operation Procedure (SOP),</i> Peraturan / <i>Policy</i> Perusahaan, SAK	SAK, SPAP	Undang-Undang, Aturan Lain, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Distribusi Hasil Pemeriksaan	Managemen Perusahaan (internal)	Publik/Investor, (perusahaan <i>listing</i> ), Komisaris & Direksi, Kreditor	Pemerintah Pusat/Daerah, DPR / DPRD.
Sifat Pekerjaan di Lapangan	flexibel, Bisa masuk ke semua lini	Menyesuaikan kontrak / cakupan kerja	Menyesuaikan aturan hukum
Sanksi atas Kelalaian/Kesalahan	Surat Peringatan, Penurunan Grade, PHK	Proses Dewan Kehormatan, Pidana (jika sangat berat)	Surat Peringatan, Penghentian sebagai Pegawai, Pidana (jika sangat berat)

Sumber: Berbagai sumber diolah 2007

Tabel 2.4  
Organisasi *Auditee* dan Auditor Pelaksana

Organisasi	Audit Internal	Audit Eksternal
Perusahaan Swasta	- Satuan Audit Internal (SAI)	- Kantor Akuntan Publik (KAP)
BUMN	- Satuan Audit Internal (SAI)	- Kantor Akuntan Publik (KAP) - BPK (auditor pemerintah)

Instansi Pemerintah - Pusat / Dept - Propinsi - Kab/Kota	- BPKP (auditor pemerintah) - Irjen (auditor pemerintah) - Bawasda Propinsi (auditor pemerintah) - Bawasda Kab/Kota (auditor pemerintah)	- BPK (auditor pemerintah)
Proyek Bantuan LN / Lembaga Donor	- Satuan Audit Internal (SAI) - BPKP (auditor pemerintah)	- Kantor Akuntan Publik (KAP) biasanya afiliasi asing - BPK (auditor pemerintah)

*Sumber: Dari berbagai sumber diolah 2007*

Audit ketaatan merupakan audit yang dilakukan untuk memastikan apakah suatu proses atau entitas ekonomi telah berjalan sesuai dengan standar atau regulasi. Penugasan audit yang diterima oleh auditor dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pemeriksaan (*examination*), Penelaahan (*review*) serta prosedur yang telah disepakati bersama (*agreed up on procedure*).

Kecurangan laporan keuangan sangat mungkin dilakukan oleh pihak manajemen. Dan tentu saja manajemen ingin agar kecurangan itu tidak diketahui oleh *stakeholders*. Hal ini bisa terjadi apabila pihak manajemen sangat canggih dalam menutupi kecurangan atau auditornya tidak mampu atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang berlaku. Kecanggihan manajemen dalam menutupi kecurangan sehingga opini yang diberikan oleh auditor salah merupakan resiko audit yang harus ditanggung oleh auditor.

### 2.3 Fraud

*Statement on Auditing Standards No. 99* mendefinisikan *fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit*”. Sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary* dalam Prasetyo et al (*Peak*

Indonesia, 2003), *fraud* didefinisikan sebagai: “Mencakup semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu”.

Sedangkan menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah: “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain”.

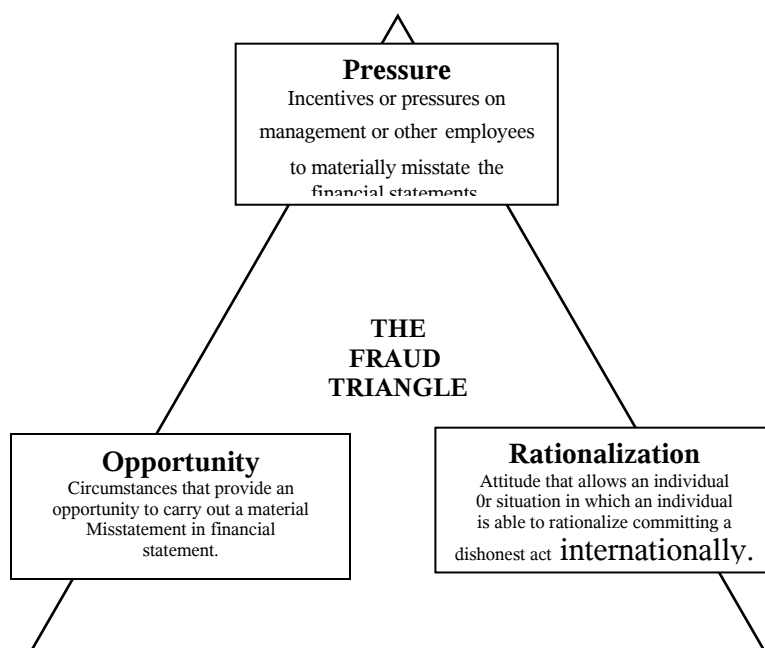
Tampubolon (2005) berpendapat, *fraud* tidak selalu sama dengan sebuah kriminal. Sebuah kriminal didefinisikan sebagai *an intentional act that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies*. Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal.

*Fraud* terjadi karena ada tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalitas (*rationalization*), atau disebut segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Gambar segitiga kecurangan dapat dilihat pada gambar 2.2. Unsur tekanan bisa dalam bentuk



kebutuhan keuangan, gaya hidup, serta tekanan pihak lain yang menyebabkan seseorang terdorong melakukan *fraud*. Unsur peluang antara lain lemahnya pengendalian internal, sistem yang mendukung, serta kepercayaan terhadap tugas seseorang terlalu luas dan berlebihan. Sedangkan rasionalitas menerangkan dimana pelaku *fraud* sudah memperhitungkan secara matang tindakannya. Misalnya tindakan menggelapkan utang yang nilainya besar tetapi hukumannya ringan, maka orang cenderung berani melakukan. Seorang eksekutif yang membuat *fraud scheme* dengan cara menciptakan *policy* sedemikian rupa sehingga menguntungkan pribadi atau kelompoknya. Apabila dikemudian hari terungkap dan hukuman yang diberikan sebatas sanksi administratif, motif ini cenderung terulang kembali

Gambar 2.2  
Segitiga Kecurangan (*Fraud Trianggle*)



Sumber: Montgomery(2002) dalam Bartkova (2005).

### 2.3.1 Motif dan Indikator *Fraud*

Identifikasi yang dilakukan Tampubolon (2005), dalam kehidupan sehari-hari motif seseorang melakukan *fraud* adalah: (1) Serakah. (2) Terikat perjudian, minuman keras, obat-obatan terlarang, wanita tuna susila atau gaya hidup sejenis. (3) Masalah keluarga atau memiliki keluarga sakit dan memerlukan biaya pengobatan tinggi. (4) Pola hidup yang melebihi penghasilan. (5) Krisis keuangan. (6) Memiliki pasangan simpanan. (7) Sakit hati pada perusahaan atau atasan dan ingin membalas. (8) Merasa kerja kerasnya tidak dihargai. (9) Iri kepada atasan atau rekan kerja yang kemampuannya kurang tetapi gaji lebih tinggi. (10) Bangga kalau bisa memecahkan sistem atau membobol *security system*. Motif terakhir ini tidak semata-mata dorongan uang, tetapi lebih pada motif kepuasan.

Sedangkan indikator *Fraud (Red Flags of Fraud)* pada perusahaan menurut Krell (2002) dalam Bartkova (2005) adalah:

1. *Lax Accounting*, biasanya terjadi karena penerapan praktek akuntansi yang agresif.
2. *Failure to Anticipate Cash Needs*, menurunnya likuiditas perusahaan, dan sering menunda pembayaran kepada pihak lain.
3. *Supply Chain Blindless*, sistem manajemen yang menyangkut pembelian, persediaan, produksi, dan pengiriman barang tidak teratur dan tidak terencana.
4. *Perils of Dirty Data*, penggunaan data yang tidak bisa diandalkan bahkan data palsu.
5. *Draining the Talent Pool*. Karyawan tidak loyal terhadap perusahaan karena tuntutan pekerjaan tinggi, sedangkan penghargaan minim.

6. *Hazard of Weak Governance*. Tata kelola yang buruk sehingga memberi peluang terhadap tindak kecurangan.
7. *Ignoring the Importance of Crisis Management*, manajemen mengelola perusahaan dengan cara yang salah atau integritas rendah.

### 2.3.2 Faktor-Faktor Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Factors*)

*Statement on Auditing Standard No. 99* (sebelumnya *SAS No. 82*), mewajibkan auditor secara khusus menentukan risiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan pada setiap penugasan audit. Untuk kepentingan ini, auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji, baik yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan maupun salah saji karena penyalahgunaan aktiva. Tabel 2.5 menyajikan jenis, pelaku dan korban *fraud* yang dikelompokkan oleh *ACFE*.

Tabel 2.5  
Jenis, Pelaku dan Korban Kecurangan

Jenis Kecurangan	Korban	Pelaku	Penjelasan
Penggelapan uang atau kecurangan pekerjaan	Pegawai	Pemberi Kerja	Pemberi kerja secara langsung atau tidak langsung mengambil hak dari pekerjanya.
Kecurangan Manajemen	Pemegang saham, dan pihak lain yang bergantung pada laporan keuangan	Manajemen tingkat atas	Manajemen tingkat atas memberikan penyajian yang salah, khususnya pada informasi keuangan.
Kecurangan Investasi	Investor	Individu	Individu menipu investor dengan investasi yang "curang".
Kecurangan Penyediaan / logistik	Pembeli barang atau jasa	Penjual barang atau jasa	Mengenakan biaya yang berlebih atas barang atau jasa kepada pembeli.
Kecurangan pelanggan	Penjual barang atau jasa	Pelanggan	Pelanggan menipu penjual untuk memberikan sesuatu yang semestinya tidak mereka dapatkan atau meminta harga yang lebih kecil dari

			seharusnya.
--	--	--	-------------

*Sumber: the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Prasetyo (Peak Indonesia 2003)*

Faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan dikelompokkan menurut AICPA (1997) dalam Apostolou *et al* (2001) menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Karakteristik Manajemen. Faktor-faktor risiko dalam kelompok ini menyangkut kemampuan, tekanan, gaya, dan sikap manajemen yang berkaitan dengan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Secara rinci, faktor-faktor risiko tersebut adalah:
  1. Komitmen manajemen kepada analis atau kreditor terhadap penyelesaian utang perusahaan yang terlalu agresif atau tidak realistis.
  2. Manajemen melakukan cara-cara yang tidak semestinya untuk menurunkan laba guna memperkecil pajak.
  3. Manajemen gagal memperbaiki kelemahan struktur pengendalian internal.
  4. Manajemen tetap mempertahankan kebijakan akuntansi, teknologi informasi, atau internal audit yang tidak efektif.
  5. Sikap atau upaya manajemen untuk mempengaruhi lingkup audit.
  6. Manajemen memberikan penekanan yang berlebihan atas pencapaian proyeksi laba.
  7. Reputasi manajemen dalam masyarakat bisnis sangat rendah.

- b. Kondisi-kondisi Industri. Faktor-faktor risiko yang termasuk dalam kelompok ini meliputi faktor-faktor ekonomi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasi perusahaan, antara lain:
1. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba tidak memadai atau lebih rendah dibanding dengan perusahaan lain yang sejenis (kualitas laba yang rendah).
  2. Tingkat perubahan rata-rata industri sejenis terlalu cepat.
  3. Tuntutan ganti rugi dan keluhan dari mitra kerja dan pelanggan meningkat.
  4. Peraturan-peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi laba atau stabilitas keuangan perusahaan.
  5. Kerentanan hasil usaha perusahaan terhadap faktor-faktor ekonomi, misalnya inflasi, tingkat bunga pinjaman, pengangguran dan lain-lain.
- c. Karakteristik Operasi dan Stabilitas Keuangan. Faktor-faktor berikut ini berkaitan dengan sifat dan rumitnya transaksi, kondisi keuangan, dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
1. Transaksi dalam jumlah besar dan tidak biasa atau sangat rumit pada akhir tahun.
  2. Pertumbuhan laba yang tidak biasa dibanding dengan pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan sejenis.
  3. Ancaman terhadap kebangkrutan (*hostile takeover*).
  4. Posisi keuangan yang jelek dan sebagian besar utang perusahaan dijamin oleh manajemen secara pribadi.

### 2.3.3 Pengelompokan *Fraud*

Menurut *the Association Certified Fraud Examiners*, pengelompokan kecurangan menjadi tiga hal, yaitu:

#### 1. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan ini didefinisikan sebagai kecurangan oleh manajemen atau pengelola perusahaan dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan *stakeholders* khususnya investor, kreditor atau otoritas perpajakan.

#### 2. Penyalahgunaan Aset

Kecurangan ini terbagi dalam kecurangan kas dan kecurangan non kas. Kecurangan non kas sangat sering terjadi pada persediaan.

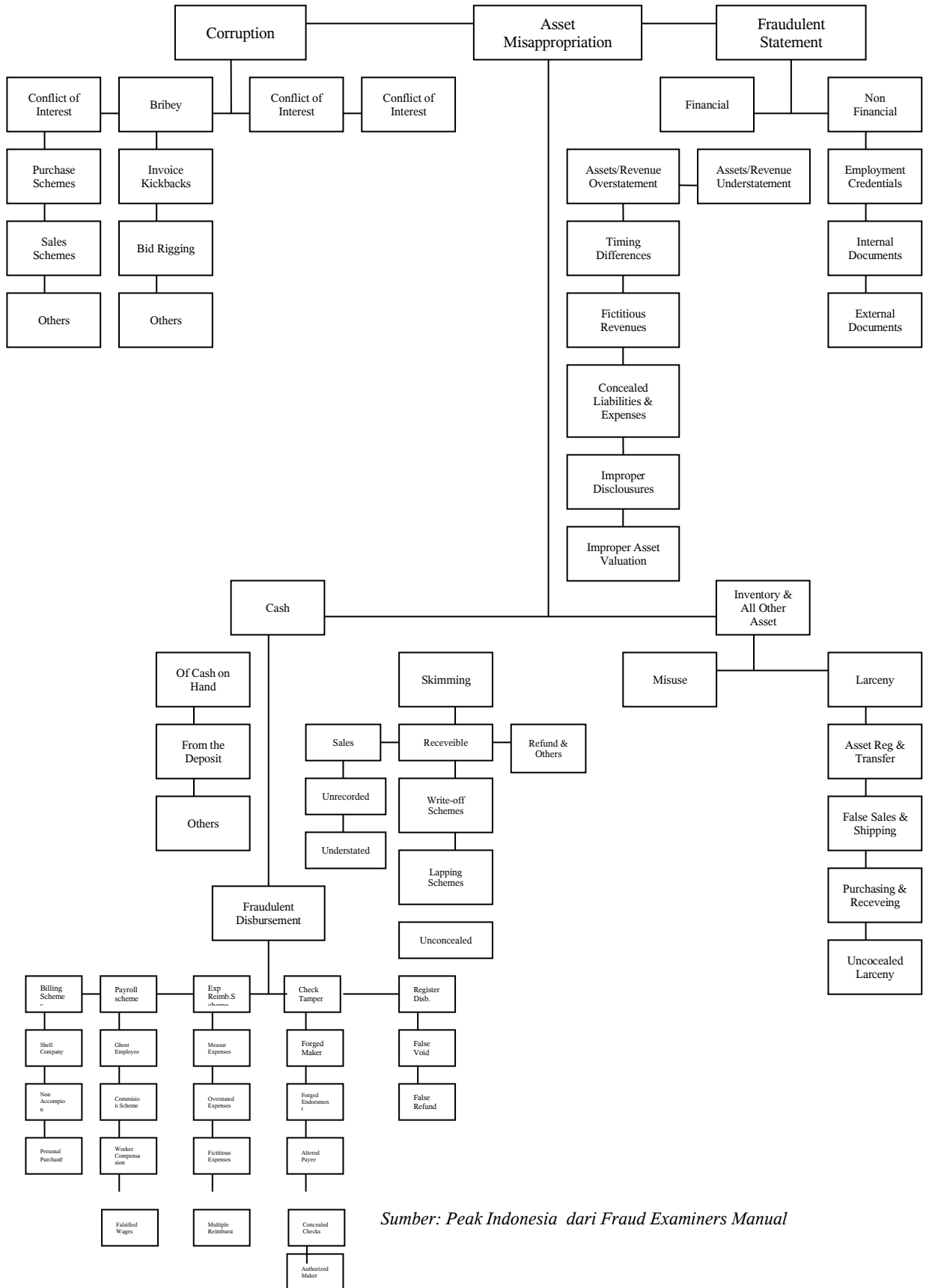
#### 3. Korupsi

Kecurangan ini dapat dibedakan ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Organisasi *ACFE* juga memberikan gambaran detil tentang pohon kecurangan (*fraud tree*) yang dapat dilihat di gambar 2.3, dimana disitu jabarkan cabang-cabang dan ranting dari *fraud*.

*Advisory Standard* dari *the IIA No. 1210.A2* dalam Tampubolon (2005) menegaskan, auditor tidak harus ahli seperti orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk menemukan pelaku *fraud* dan menginvestigasi *fraud*, tetapi wajib memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi semua indikator dari adanya *fraud*.

Gambar 2.3  
The Fraud Tree



Sumber: Peak Indonesia dari Fraud Examiners Manual

Perbedaan yang mendasar antara kecurangan Laporan Keuangan dan Penyalahgunaan aset bisa dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6  
Perbedaan *Fraud* Laporan Keuangan dan Penyalahgunaan Aset

Karakteristik	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset
Definisi	Salah saji, atau tidak menyajikan suatu nilai, atau pengungkapan yang sengaja untuk menipu pemakai laporan keuangan.	Pencurian aset milik entitas
Pelaku	Biasanya dilakukan oleh manajemen.	Biasanya dilakukan oleh pegawai, namun dapat juga dilakukan oleh manajemen.
Yang dirugikan	Pihak ketiga yang menggunakan laporan keuangan.	Entitas
Yang diuntungkan	Entitas diuntungkan secara tidak langsung di waktu mendatang.	Pelaku secara langsung dan segera.
Hubungannya dengan pengendalian intern ( <i>Internal Control</i> )	Terdapat hubungan tidak langsung antara pengendalian dengan resiko kecurangan. Pengendalian yang tidak efektif merupakan identifikasi adanya perilaku tidak tepat yang berkaitan dengan pengendalian dalam proses pelaporan. Perilaku yang tidak tepat tersebut merupakan identifikasi adanya keinginan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.	Terdapat hubungan langsung antara pengendalian intern dengan resiko kecurangan. Pengendalian yang tidak efektif menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan aset.
Nilai materialitasnya terhadap laporan keuangan.	Hampir selalu material, karena sesuai karakteristik definisinya, kecurangan tersebut dilakukan untuk menipu pemakai laporan keuangan.	Mungkin material, mungkin tidak material.

Sumber: ACFE dalam Prasetyo et al (Peak Indonesia 2003)

#### 2.3.4 Tindakan *Fraud* di Entitas Komersial

##### Kecurangan Laporan Keuangan

Terdapat lima klasifikasi dalam kecurangan laporan keuangan, yaitu:

1. Pendapatan fiktif (*Fictitious Revenue*). Mencatat penjualan barang atau jasa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Biasanya merupakan penjualan kepada konsumen



fiktif (*ghost customers*), atau penjualan fiktif kepada konsumen yang sebenarnya ada, namun tidak pernah ada pengiriman barang atau penyediaan jasanya.

2. Perbedaan waktu (*Timing Difference*). Kecurangan ini berkaitan dengan pencatatan penjualan atau biaya pada periode waktu yang salah, sehingga prinsip *matching cost againsts revenue* tidak ditaati. Akibatnya terjadi pelaporan *net income* yang terlalu tinggi dalam periode akuntansi, sedangkan dalam periode lainnya *net income* menjadi terlalu rendah dilaporkan, atau sebaliknya. Dorongan *fraud* ini biasanya menyangkut *performance* dan bonus tahunan pengelola perusahaan.
3. Menyembunyikan kewajiban dan biaya. Kecurangan ini dilakukan dengan cara tidak mengungkap adanya kewajiban dan biaya dalam laporan keuangan. Terdapat tiga metode umum yang digunakan, yaitu:
  - a. Menghilangkan kewajiban.
  - b. Mengkapitalisasi biaya.
  - c. Membiayakan pengeluaran modal.
  - d. Tidak mengungkap kewajiban atas penjaminan produk atau kontinjensi lain.
4. Pengungkapan yang tidak tepat. Manajemen tidak mengungkapkan kejadian kejadian penting, misalnya transaksi-transaksi dengan hubungan istimewa, penjualan produk baru yang biasanya *high risk*, penggunaan teknologi atau metode baru, serta tidak mengungkap penghitungan estimasi.
5. Cara penilaian aktiva tidak tepat. Penilaian aset yang dilakukan tidak sesuai standar akuntansi yang berlaku.

### Kecurangan Pemakaian Aset

- a. *Skimming* adalah pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat dalam sistim akuntansi. Selain itu juga dikenal dengan kecurangan “*off book*”, yang berarti uang dicuri sebelum dicatat dalam pembukuan sehingga tidak ada jejak audit (*audit trail*) yang ditinggalkannya.
- b. *Cash Larcency* adalah pencurian terhadap kas secara sengaja.
- c. Pencurian persediaan

Ada empat kategori dalam pencurian persediaan dan aset lainnya, yaitu:

1. *Larcency Scheme*, adalah pengambilan persediaan perusahaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pencurian tersebut dalam buku dan catatan, dilakukan pegawai gudang, pegawai persediaan, pegawai pengiriman dan pegawai lainnya yang punya akses terhadap persediaan. Banyak pegawai yang secara terang-terangan membawa aset perusahaan keluar gudang tanpa dicurigai oleh rekan kerjanya karena mereka beranggapan bahwa mereka sedang melaksanakan tanggung jawabnya.
2. *Asset Requisition and Transfer Scheme*, bentuk dasar kecurangan ini terjadi saat seorang pegawai meminta material persediaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam berbagai kasus mereka meninggikan (*mark-up*) jumlah yang diminta dan menciptakan satu proyek yang benar-benar fiktif untuk mencuri material yang mereka inginkan. Adapula pegawai yang memalsukan *form* permintaan barang untuk mengambil barang dari gudang.
3. *Purchasing & Receiving Scheme*, pegawai yang mempunyai kewenangan untuk membeli barang, yang sebenarnya tidak diperlukan perusahaan. Kerugian

yang diderita perusahaan adalah sebesar pembayaran aset yang tidak pernah ada tersebut. *False Shipment Scheme*, keuntungan bagi pelaku adalah aset dikirim dari gudang oleh orang lain (bukan pelaku kecurangan). Perusahaan tidak sadar bahwa dia telah mengirimkan aset kepada pelaku kecurangan.

d. Kecurangan Pengeluaran Kas

Kecurangan yang dilakukan terhadap pengeluaran perusahaan diantaranya adalah:

1. *Billing Scheme* atau kecurangan dalam penagihan. Mayoritas pengeluaran perusahaan terjadi dalam siklus pembelian, maka kecurangan ini menyumbangkan kerugian yang lebih besar dibandingkan lainnya. *Billing Scheme* dirancang untuk menghasilkan uang tunai. Pelaku membuat *voucher*/tagihan untuk perusahaannya, dengan dokumen tersebut perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar barang/jasa dengan harga yang telah ditinggikan.
2. Membuat tagihan melalui *shell company*. *Shell company* adalah satu entitas fiktif yang sengaja didirikan dengan maksud untuk melakukan kecurangan.
3. Membuat tagihan melalui perusahaan yang bukan mitra tetap yang dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran ganda.
4. Kecurangan dalam pembayaran gaji atau upah. Dalam kecurangan ini yang dipalsukan adalah kartu catatan waktu kerja (*time card*) atau memalsukan informasi yang ada dalam catatan gaji. Metode yang digunakan antara lain: Pegawai fiktif (*ghost employees*), Memalsukan informasi waktu kerja dan tarif gaji, dan kecurangan komisi.

5. Kecurangan dalam permintaan penggantian biaya. Kecurangan melalui manipulasi pengeluaran kas dapat dilakukan pegawai dengan cara memanipulasi prosedur penggantian beban biaya.

#### Korupsi

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, korupsi dapat digolongkan ke dalam kategori:

1. *Conflict Of Interest*. Bertentangan kepentingan (*conflict of interest*) terjadi saat pegawai memiliki kepentingan ekonomis perorangan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau entitas usaha.
2. *Illegal Gratuity*. Pemberian hadiah dari pihak yang diuntungkan kepada pegawai yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
3. *Bribery*. Suap dapat didefinisikan sebagai penawaran, pemberian atau penerimaan segala sesuatu yang memiliki niat untuk mempengaruhi aktivitas atau keputusan seseorang. Termasuk didalamnya adalah unsur *mark-up* yang dikembalikan dalam bentuk komisi (*kickback*).
4. *Economic extortion*. Pemerasan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain.

#### 2.3.5. Tindakan Fraud di Entitas Pemerintah

Skema *fraud* yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP (2004) menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai berikut:

Dari segi penerimaan:

1. Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia.
2. Manipulasi restitusi pajak.
3. Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya.
4. Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea.
5. Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai data sesungguhnya.
6. Perusahaan yg ditunjuk oleh pemerintah pusat /daerah memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam.
7. Memperbesar biaya *cost recovery*, sehingga setoran hasil menjadi berkurang.
8. Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara.
9. Pemegang HPH maupun masyarakat mengeksploitasi hutan diluar kewilayahannya.
10. Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar.
11. Pelaksanaan tukar guling (*ruislaag*) yang merugikan negara dan pemanfaatan tanah negara yang harga sewanya tidak wajar (dibawah pasar).
12. Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun cara ini berpotensi merugikan negara.

Dari segi pengeluaran:

1. Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas barang fiktif.
2. Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan.

3. Pengelembungan (*mark-up*) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar.
4. Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau sesuai prosedur tetapi hanya memenuhi persyaratan formalitas.
5. Pemenang tender men-sub kontrak-kan pekerjaannya kepada pihak ketiga, sehingga posisi rekanan tidak lebih sebagai *broker* semata.
6. Rekanan atau konsultan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai jadwal yang ditetapkan.
7. Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi.
8. Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah sasaran.
9. Adanya “percaloan” dalam pengurusan alokasi dana, sehingga instansi atau daerah yang ingin mendapatkan alokasi anggaran perlu mencadangkan dana untuk komisi.
10. Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan, akuntan, *underwriter*, dan penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program pemerintah atau BUMN.
11. Privatisasi BUMN yang merugikan negara.
12. Biaya restrukturisasi, bantuan likuiditas dan biaya lain-lain yang sejenis yang merugikan negara.

#### **2.4 Pencucian Uang (*Money Laundering*).**

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi aset yang seolah-

olah berasal dari kegiatan sah. Menurut PPATK (2003), modus operandi pencucian uang dikelompokkan ke dalam tiga tahap yakni:

- a. *Placement* adalah menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pelaksanaannya dalam bentuk menempatkan uang di bank sambil mengajukan kredit, menyetorkan uang sebagai pembayaran kredit, menyelundupkan uang tunai ke negara lain, membiayai usaha yang sah, membeli barang yang bernilai tinggi.
- b. *Layeing* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Bentuk kegiatan ini antara lain transfer dana antar bank, atau antar wilayah negara. Penggunaan simpanan tunai untuk agunan kredit untuk usaha yang sah.
- c. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dinikmati langsung, diinvestasikan dalam berbagai bentuk portofolio, atau membiayai kegiatan operasional usaha yang sah.

## **2.5 Pengidentifikasian dan Teknik Auditor dalam Mengungkap *Fraud***

### **2.5.1 Identifikasi Fraud**

Sampai saat ini, belum ditegaskan dalam organisasi, siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menemukan risiko kecurangan. Hampir semua perusahaan memiliki pandangan bahwa mencegah, mendeteksi dan mengungkap kecurangan menjadi tanggung jawab auditor. Alasannya karena auditor dianggap ahli dibidang kontrol. Selain itu ketika auditor melakukan tugas audit, dengan keahliannya diharapkan

dapat menemukan atau menangkap semua kecurangan yang terjadi. Padahal, menurut standar pelaksanaan fungsi audit, auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan kecurangan. Bahkan menurut Tampubolon (2005), dalam hal rekor mengungkap kecurangan, auditor kalah dibandingkan oleh rekan kerja atau pasangan (*spouse*) dari pelaku yang kecewa dan melaporkan hal itu (*blow the whistle*). Oleh karena itu diluar tanggung jawab untuk menemukan *fraud*, auditor wajib menggunakan keahliannya untuk mengungkap kecurangan, sepanjang audit yang dilakukan memperoleh indikasi adanya kecurangan.

Mekanisme utama untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah pengendalian. Pihak yang paling bertanggungjawab menetapkan dan melaksanakan pengendalian adalah manajemen. Namun demikian, internal auditor juga memiliki tanggung jawab membantu manajemen dalam upaya mencegah kecurangan. Secara khusus, internal auditor menentukan:

- a. Apakah lingkungan organisasi sudah memelihara dan melaksanakan pengendalian.
- b. Apakah tujuan dan sasaran organisasi ditetapkan secara rasional.
- c. Apakah terdapat kebijakan tertulis perusahaan yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tindakan apa yang dilakukan bila dijumpai adanya penyimpangan.
- d. Apakah sudah ditetapkan kebijakan yang berhubungan dengan otorisasi.
- e. Apakah kebijakan, prosedur dan praktek sudah didesain untuk memantau kegiatan dan mengamankan aset, khususnya untuk area berisiko tinggi.



- f. Apakah saluran komunikasi sudah memberikan informasi yang tepat dan dapat diandalkan manajemen.

Dalam hal penindakan terhadap fraud, dapat dikelompokkan dalam tiga tahap yakni, tindakan preventif, detektif dan represif.

Tindakan preventif diantaranya:

1. Memberi kesejahteraan yang layak kepada pegawai
2. Menjaga kualitas SDM dengan pembekalan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
3. Memperkuat pengawasan dari atasan maupun dari rekan kerja
4. Memperkuat struktur internal control
5. Menerapkan standar prosedur kerja secara konsisten
6. Memperkuat posisi internal audit
7. Membentuk Komite Audit
8. Menerapkan system risk management
9. Tidak memberikan pekerjaan dari awal sampai akhir kepada satu bagian.
10. Memperkuat instrument anggaran sebagai pengendali organisasi
11. Memperkuat penerapan kode etik

Tindakan detektif terdiri dari:

1. Memperbaiki dan menerapkan system tindak lanjut dari pengaduan.
2. Melaporkan transaksi-transaksi khusus diluar standar prosedur baku
3. Mendalami fraud auditing bagi anggota internal audit
4. Memantau gejala-gejala fraud sejak dini, tetapi tidak melanggar aturan social maupun aturan kerja.

5. Berpartisipasi dalam gerakan moral

Tindakan represif dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan investigative audit jika diperlukan
2. Jika bukti mendukung, perlu dilanjutkan ke proses berikutnya. Teguran, peringatan, PHK atau diteruskan ke aparat berwenang.
3. Penyitaan barang bukti, dokumen-dokumen, bahkan kekayaan jika terbukti kekayaan tersebut hasil korupsi perusahaan.

### 2.5.2 Teknik Auditor Mengungkap Fraud

Teknik *fraud audit* untuk mendeteksi dan mengungkap *fraud* dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan neraca, laba rugi dan arus kas dengan menggambarannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang usaha dengan total hutang dari 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan malah turun, dapat menjadi satu dasar adanya indikasi kecurangan.
- b. Analisis horisontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan dengan angka wajar sedangkan harga pokok mengalami kenaikan drastis. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur

penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif atau penggelapan yang terkait harga pokok.

- c. Analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah *current ratio*, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.

## 2. Penyalahgunaan Aset

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda.

- a. *Analytical review*. Suatu *review* atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitik lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan *overbilling scheme* atau kecurangan pembelian ganda.
- b. *Statistical sampling*. Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode

deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif.

- c. *Vendor or outsider complaints*. Komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- d. *Site visit observation*. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut.

*Fraud Auditor* perlu mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya. Untuk mencapai tujuan diatas, internal auditor melakukan kegiatan–kegiatan berikut:

- a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
- d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.

- e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Menurut Tampubolon (2005) sebuah investigasi *fraud* akan menumbuhkan antara lain tugas-tugas berikut:

1. Analisis atas catatan – catatan akuntansi dan catatan lainnya.
2. Wawancara dengan pegawai dan dengan pihak ketiga.
3. Pengumpulan informasi mengenai keahlian dari orang yang dicurigai, yang mungkin saja adalah pegawai, pelanggan, pemasok, *vendor*, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya.
4. Mempelajari hasil rekaman dari alat komunikasi, elektronik, atau alat monitor seperti *CCTV (closed circuit television)* yang ditempatkan di beberapa titik kantor.
5. *Computer forensics* dan *data mining*.
6. Penyamaran atau menanam informan.

Investigasi *fraud* dapat keluar jalur apabila tindakan yang diambil di tahap awal tidak tepat sehingga orang yang dicurigai sebagai pelaku punya kesempatan untuk menghapus jejak, menghancurkan bukti – bukti yang ada dan merekayasa alibi yang dapat diterima. Dalam menjalankan tugas investigasi ini, auditor tidak boleh berlebihan sehingga melanggar *privacy* dari orang yang dicurigai sebagai pelaku, karena dalam hal ini auditor akan terbuka dari tututan yang justru dapat menjauhkan auditor dari tujuan investigasi.

### 2.5.3 Investigasi

Investigasi memiliki kemampuan untuk melihat adanya indikasi suatu tindak pidana, perdata atau ganti rugi, sebagai konsekuensi tindakan *fraud*. Menurut Prasetyo et al (Peak Indonesia,2003) Tujuan utama investigasi bukan untuk mencari siapa pelakunya, namun menekankan pada bagaimana kejadian sebenarnya (*search for the truth*), setelah kejadian sebenarnya terungkap, secara otomatis pelaku *fraud* akan didapat. Acuan kode etik seorang investigator tidak boleh semata-mata tergantung pada aturan tertulis saja, tetapi harus memahami nilai-nilai keadilan yang tersirat dalam aturan tertulis tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua aturan tertulis memiliki cerminan keadilan. Salah satu kriteria yang harus dimiliki seorang investigator adalah tidak memiliki *vested interest* atau timbulnya *conflict of interest* dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu teknik investigasi adalah melakukan wawancara, karena didalamnya bisa mendalami jawaban, bahasa tubuh, dan kejujuran seseorang. Berikut disajikan karakteristik wawancara investigasi yang baik, yakni:

1. Wawancara investigasi harus cukup dari segi waktu dan kedalaman untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan.
2. Wawancara investigasi yang baik bisa mencakup semua informasi yang penting dan mengeliminir informasi yang tidak relevan. Data yang tidak relevan seringkali mempersulit analisis.
3. Wawancara investigasi sedapat mungkin dilaksanakan dekat dengan kejadian untuk mengurangi potensi rusaknya memori para saksi.

4. Investigasi harus objektif untuk memperoleh informasi dan dengan cara yang tidak sepotong-sepotong (*impartial*).

Sedangkan karakteristik investigator yang baik adalah:

1. Mereka orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi, bisa mengajak orang lain berbagi informasi. Ia tidak menginterupsi lawan bicara dengan pertanyaan yang tidak penting. Sepanjang wawancara, seringkali informasi vital diperoleh dengan cara sukarela sebagai respon dari pertanyaan yang spesifik.
2. Pewawancara semata-mata sedang mencari fakta yang relevan, bukan sekedar bertemu dengan seseorang. Dapat dilakukan dengan gaya yang informal dan rendah hati. Jika yang diwawancarai dalam benaknya terpikirkan “saya akan divonis”, maka ia sulit diajak bekerja sama, malah sebaliknya investigator sulit memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3. Pewawancara harus bersikap wajar, *fair*, rapi, tepat waktu, berinteraksi, hangat, dan lain-lain.

## **2.6 *Good Corporate Governance* dan *Sarbanes-Oxley Act 2002***

Istilah *good governance* dapat diartikan terlaksananya tata kelola yang baik. Sedangkan *good corporate governance (GCG)* adalah tata kelola bisnis yang baik dan bertanggung jawab. Unsur-unsur yang terkandung dalam *GCG* menurut Swa (2005) adalah: (1) Kewajaran (*fairness*), dimana semua transaksi perusahaan dan hubungan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan haruslah wajar. (2) Transparansi (*tranparency*), dimana perusahaan haruslah terbuka terhadap kinerja keuangan maupun operasionalnya. (3) Akuntabilitas (*accountability*), dimana manajemen diwajibkan

mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemegang saham. (4) Responsibilitas (*responsibility*), yakni perusahaan diwajibkan mematuhi peraturan baik dari pemerintah maupun lembaga yang terkait serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan sembilan dimensi *GCG* yang menjadi acuan perusahaan menurut majalah Swasembada adalah: (1) Komitmen terhadap tata kelola perusahaan. Sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dalam mewujudkan tujuan perusahaan. (2) Tata kelola dewan komisaris. Sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran komisaris dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan. (3) Komite-komite fungsional. Sistem manajemen yang memungkinkan peran anggota komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan. (4) Dewan Direksi. Sistem manajemen yang menuntut para direksi adalah para eksekutif yang profesional, memiliki *track record* yang baik, dan berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. (5) Transparansi. Sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan (termasuk akses) informasi yang relevan, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan. (6) Perlakuan pemegang saham. Menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham dan calon pemegang saham. (7) Peran pihak berkepentingan lainnya. Sistem manajemen yang dapat meningkatkan peran para *stakeholders*. (8) Integritas. Mampu menumbuhkan semangat memegang teguh tata nilai yang disepakati oleh perusahaan. (9) Independensi. Sistem manajemen yang mampu memunculkan semangat kemandirian anggota perusahaan agar mampu memutuskan dan mendahulukan kepentingan perusahaan.



Sedangkan undang-undang *Sarbanes-Oxley Act (SOX)* 2002, adalah undang-undang diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan *Representative* Michael Oxley dan disahkan di Amerika Serikat tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dipandang sebagai reformasi terbesar bagi pengukuran *corporate governance* sejak diterbitkannya *Securities Act of 1933* dan *1934*. Menurut Biegelman (2003) dalam Santoso (2004) , dengan diterbitkannya undang-undang ini ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchange Commission (SEC)* dan *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi laporan keuangan, serta memperkecil perusahaan melakukan dan menyembunyikan *fraud*. Menurut Santoso (2004), pokok-pokok dalam *Sarbanes-Oxley Act* adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan *the public company accounting oversight board*, sebuah dewan yang independen dan bekerja *full-time* bagi pelaku pasar modal.
- b. Mendefinisikan jasa “non audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien.
- c. Mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai manajemen.
- d. Kode etik bagi pejabat khususnya bidang keuangan.
- e. Pembatasan kompensasi eksekutif.
- f. Pembentukan komite audit dan menetapkan tanggung jawabnya.
- g. Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen).
- h. Penambahan tanggung jawab dan anggaran *SEC* secara signifikan.
- i. Memperbesar hukuman bagi terjadinya *corporate fraud*.

j. Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik kepentingan (*conflict of interest*).

k. Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.

Sesuai dengan *Title II Section 201 Sarbanes-Oxley Act* , jasa non audit yang tidak diperbolehkan bagi auditor independen terhadap klien adalah:

1. Jasa pembukuan atau jasa yang berhubungan dengan laporan keuangan klien.
2. Sistem informasi keuangan, baik desain maupun implementasinya.
3. Jasa appraisal atau penilaian.
4. Jasa aktuarial.
5. Jasa *internal audit outsource*.
6. Fungsi manajemen atau sumber daya manusia.
7. Broker atau dealer, *investment adviser*, atau jasa investasi perbankan.
8. Jasa legal dan jasa *expert* diluar audit.
9. Jasa-jasa lain yang menurut dewan (*board*) tidak diperbolehkan.

## **2.7 Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Entitas**

Merujuk pada *agency theory*, hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan *shareholder (principal)* adalah hubungan kerjasama dan saling kontrol satu sama lain. Pihak manajemen perusahaan diberi amanat untuk mengelola dan menjaga investasi yang dipercayakan oleh pemegang saham. Di sisi lain, *shareholder* berkewajiban menilai dan memberi kompensasi kepada manajemen. Secara periodik manajemen wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan entitasnya. Pola hubungan

*agent-principal* ini bisa terjadi dimana saja termasuk di entitas komersial maupun entitas pemerintahan.

Laporan pertanggungjawaban entitas komersial pada umumnya adalah laporan keuangan berupa neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Sedangkan laporan pertanggungjawaban entitas pemerintah adalah laporan pengelolaan APBN/APBD. Namun seiring tuntutan *good governance* dan profesionalisme di sektor pemerintahan, pemerintah pusat maupun daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban sesuai amanat PP nomor 24 tahun 2005 yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan diatur secara rinci dalam PSAP. Dalam hubungan *agent-principal* ini auditor diposisikan sebagai wasit atau penengah atau pihak penjamin yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan laporan yang dibuat *agent*.

## **2.8 Kerangka Penelitian dan Perumusan Hipotesis**

Terdapat dua kelompok variabel dalam penelitian ini yaitu *fraud audit* (audit terhadap kecurangan) dan *fraud auditor* (auditor yang melaksanakan audit kecurangan). Masing-masing variabel adalah independen, tidak mempengaruhi satu sama lain. Dari kedua variabel tersebut, dilakukan uji persepsi terhadap tiga kelompok auditor yakni auditor internal, auditor eksternal (akuntan publik) dan auditor pemerintah (dalam hal ini BPK). Uji yang digunakan adalah *independen sample t-test*, sehingga tidak bisa tiga kelompok auditor sekaligus. Masing-masing hipotesis ada 2 kelompok yang diuji, sehingga terdapat 6 hipotesis. Apakah terdapat persamaan atau perbedaan persepsi yang signifikan setelah dilakukan uji beda antara masing-masing kelompok..

Profesi audit dituntut mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan *fraud*, motifnya, indikasinya, dan bagaimana pola *fraud* bekerja. Oleh karena itu ia harus memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup mengenai seluk beluk *fraud*. Hasil penelitian Enawati (2005) memberikan bukti bahwa tidak adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor internal dan eksternal terhadap *fraud* audit dan *fraud* auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut menggunakan responden di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut akan kami uji kembali ditambah dengan satu variabel yakni auditor pemerintah serta wilayah penelitian diperluas menjadi se-Jawa. Penelitian ini menguji 2 hipotesis terdiri dari:

Hipotesis satu (H1):

*Tidak ada perbedaan persepsi antara **auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah** terhadap penugasan audit kecurangan (**fraud audit**).*

Hipotesis satu (H2):

*Tidak ada perbedaan persepsi antara **auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah** terhadap profil auditor kecurangan (**fraud auditor**).*

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *fraud, fraud audit, dan fraud auditor* baik dari luar negeri maupun dalam negeri dapat dilihat dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7  
 Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan dengan *Fraud*, *Fraud Audit*  
 dan *Fraud Auditor*

Peneliti	Tema	Tahun	Kesimpulan
Barbara Apostolou	<i>How Various Auditor Groups Rate the Relative Importance of SAS No 82 risk Factors</i>	2001	Dari ketiga kelompok factor risiko yakni karakteristik manajemen dan kontrol lingkungan, kondisi industri dan karakteristik operasi dan keuangan perusahaan paling tinggi beresiko adalah karakteristik manajemen.
Stephen Owusu-Ansah, et al	<i>An Empirical analysis of the likelihood of detecting fraud in Zew Zeland</i>	2002	Kejadian <i>fraud</i> yang paling besar menimbulkan kerugian di perusahaan ada di bagian purchasing / logistik.
Riyadani	Pengaruh tekanan waktu, kompleksitas tugas dan motivasi pencapaian terhadap perhatian auditor pada fraud.	2003	Meskipun mendapat tekanan waktu dan kompleksitas tugas, perhatian auditor terhadap <i>fraud</i> tidak berkurang.
IFAC	Siapa pendeteksi utama kejahatan ekonomi	2004	Hasilnya 47 persen kejahatan ekonomi berhasil di deteksi oleh internal audit dan eksternal audit. Persentase ini menempati urutan paling tinggi dibanding polisi atau manajemen.
Pricewater House Coopers	<i>Global Economic Crime Survey</i>	2007	Persentase tertinggi " <i>The lasting impact of economic crime</i> " adalah: Penurunan harga saham, disusul reputasi, kemudian <i>brand image</i> .
The Association of Certified Fraud Examiners	<i>Methods of Fraud - Survey</i>	2004	Diantara tindak <i>fraud</i> yakni: penyalahgunaan aset, korupsi, dan penipuan laporan keuangan, persentase terbesar (volume kejadian) di Amerika adalah penyalahgunaan aset.
The Office	<i>Preventing and</i>	2005	Diantara kejadian <i>fraud</i> yakni <i>asset</i>

of the Inspector General	<i>Detecting Fraud, Waste and Abuse in state and local government.</i>			<i>misappropriations</i> (penyalahgunaan aset), <i>corruption schemes</i> (skema korupsi), dan <i>fraudulent statements</i> (laporan yang menipu) urutan paling atas adalah penyalahgunaan aset. Tingkat kebocoran dari <i>fraud</i> sebesar 6% dari pendapatan. Pelaku <i>fraud</i> biasanya adalah pemegang posisi, pegawai lama, dan orang yang selama ini dipercaya. Urutan paling atas pendeteksi <i>fraud</i> di entitas pemerintahan adalah tip, kemudian internal auditor, dan urutan terakhir adalah kepolisian.
Maria Enawati	Persepsi auditor internal dan auditor eksternal Terhadap fraud audit dan fraud auditor dalam mendeteksi kecurangan.	2005		Tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor internal dan auditor eksternal terhadap <i>fraud audit</i> dan <i>fraud auditor</i> .
Ernst & Young	<i>Ernst &amp; Young Fraud Survey 2006: Fraud Risk in Emerging Market</i>	2006		<i>Internal control</i> masih menduduki peringkat paling atas untuk mencegah dan mendeteksi <i>fraud</i> , kemudian disusul <i>internal audit</i> , <i>management review</i> , pendidikan kebijakan internal, perlindungan terhadap <i>wistle blower</i> (pengungkap), rotasi personil reguler, dan urutan terakhir adalah <i>external audit</i> .
KPMG	<i>KPMG Fraud Survey 2006: The Value of Internal Audit in Fraud Detection</i>	2006		Organisasi yang memiliki fungsi <i>internal audit</i> lebih memungkinkan ( <i>more likely</i> ) mendeteksi dan melaporkan fraud dalam organisasinya daripada yang tidak memiliki fungsi ini.  Personil <i>internal audit</i> yang sumbernya dari internal organisasi lebih efektif mendeteksi <i>fraud</i> dari pada <i>internal audit</i> yang sumber personilnya dari <i>outsourcing</i> .

Berbeda dengan penelitian *fraud* sebelumnya oleh Enawati, penelitian ini menyertakan kelompok auditor pemerintah, selain auditor internal dan eksternal (akuntan publik). Juga cakupan wilayah penelitian, kalau Enawati hanya Jawa Tengah, penelitian ini diperluas menjadi se Jawa. Jika melihat beberapa sampel terutama perusahaan maupun instansi yang berkantor pusat di Jakarta yang memiliki wilayah penugasan secara nasional bahkan ada yang internasional, maka hasil penelitian ini bisa mewakili gambaran nasional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja sebagai auditor internal di perusahaan *profit oriented*, auditor pada Kantor Akuntan Publik serta auditor pemerintah yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber aslinya. Diperoleh melalui *survey* dengan cara mengirim kuesioner, baik secara langsung maupun via pos kepada auditor internal yang bekerja di perusahaan-perusahaan, auditor yang bekerja KAP serta auditor pemerintah yang bekerja di BPK.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Auditor internal yang bekerja di perusahaan-perusahaan *profit oriented*. Jumlah perusahaan dan auditornya tidak diketahui dalam penelitian ini.
- b. Auditor eksternal atau akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam-Lembaga Keuangan tahun 2007. Jumlah KAP



terdaftar per Januari 2007 (data Bapepam-LK) sebanyak 364, sedangkan jumlah auditornya tidak diketahui dalam penelitian ini.

- c. Auditor pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor BPK pusat yang berjumlah 1.080 orang dan di kantor perwakilan sebanyak 981 orang (data per Juli 2006), sehingga totalnya menjadi 2.061.

### 3.3.2 Sampel

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* diteruskan dengan *judgment*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih sesuai kriteria tertentu yang oleh peneliti dianggap merupakan penting dari populasi. Sampel yang dipilih adalah:

- a. Auditor internal yang bekerja di perusahaan, yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) per tahun yang dimuat dalam majalah Swa edisi Desember 2006. Alasan pemilihan ini karena perusahaan yang memiliki nilai penjualan diatas 1 triliun kemungkinan besar sudah memiliki bagian internal audit atau SPI. Peneliti memilih 25 perusahaan, masing-masing dikirim 6 kuesioner. Sehingga total sampel sebanyak 150 auditor internal.
- b. Auditor yang bekerja di beberapa Kantor Akuntan Publik. Peneliti memilih 2 KAP besar yang berafiliasi dengan KAP asing (KAPA) dengan jumlah masing-masing 25 kuesioner, sehingga jumlahnya 50. Alasannya memilih 2 KAP tersebut karena memiliki jumlah auditor dan klien relatif banyak dan cakupan wilayah kerjanya bersifat nasional bahkan sampai luar negeri. Dilengkapi juga KAP nasional atau lokal sebanyak 25 KAP dengan masing-masing 4 kuesioner, sehingga jumlahnya 100. Alasan pemilihan ini untuk mewakili auditor di kota-kota besar di Jawa.

Dengan cara ini keterwakilan atas variasi auditor dan wilayah tugas auditor lebih merata.

- c. Auditor pemerintah yang bekerja di BPK Pusat sebanyak 70 kuesioner dan perwakilannya di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya masing-masing sebanyak 10 sampel, sehingga berjumlah 100 kuesioner. Alasan porsi kantor pusat lebih besar karena faktor banyaknya auditor dan luas lingkup tugas auditnya.

### **3.4. Prosedur Pengumpulan Data**

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode *survey*, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diisi oleh auditor internal di perusahaan, akuntan publik di KAP dan auditor pemerintah di BPK. Auditor yang mengisi kuesioner tidak dibatasi jabatan, pendidikan, pengalaman maupun jenis kelamin. Untuk menjamin kerahasiaan responden, kuesioner ini tidak disertai isian nama dan instansi tempat auditor bekerja. Kuesioner terdiri dari 33 pertanyaan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengukur persepsi tugas *fraud audit* yakni pertanyaan nomor 1 sampai dengan 24. Bagian dua mengukur persepsi profil *fraud auditor*, pertanyaan nomor 25 sampai dengan 33. Pengiriman kuesioner melalui pos atau secara langsung. Pengiriman via pos sudah disertai amplop balasan yang berperangko dan alamat pengembalian. Tujuannya untuk mempermudah pengembalian, dengan harapan tingkat *response rate* akan tinggi. Peneliti juga melakukan kontak via telepon terhadap beberapa *key person* di perusahaan, KAP serta di BPK yang bisa membantu *survey* ini.

Sebagian responden yang kami hubungi menyampaikan akan membantu mengisi kuesioner dengan syarat nama mereka dan nama perusahaan atau KAP tempat mereka

bekerja dirahasiakan, maka penelitian mengakomodasi pendapat tersebut. Oleh karena itu dalam rincian sampel dan *response* auditor, penelitian ini tidak menyebut kedua identitas di atas.

### **3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jawa. Pengambilan sampel sebagian besar merupakan auditor di perusahaan, Kantor Akuntan Publik, dan pegawai BPK yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki jangkauan audit secara nasional. Sisanya merupakan auditor perusahaan, auditor di KAP dan BPK di kota besar di Jawa. Jangka waktu penelitian adalah bulan April sampai dengan Juni 2007.

### **3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel-variabel yang diukur melalui persepsi para kelompok auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah dalam penelitian ini adalah *fraud audit* (audit kecurangan) dan *fraud auditor* (auditor kecurangan). Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan pengukuran ordinal menggunakan skala likert. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Skala *likert* yang digunakan 10 skor, dimana setiap jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 10 pada setiap pilihan. Jika jawaban mendekati 1 berarti responden semakin tidak setuju, dan jika mendekati 10 semakin setuju. Secara teknis uji statistik dengan SPSS, variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah 24 pertanyaan yang mengukur *fraud audit* dan 9 pertanyaan yang mengukur *fraud auditor*, sedangkan variabel terkontrol (*dependen*) adalah kelompok

auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah. Berikut disajikan detail indikator variabel dalam tabel 3.1.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dikemukakan untuk memberikan gambaran mengenai *demografi responden* yakni jenis kelamin, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, dan wilayah kerja, kelompok auditor, dan deskripsi mengenai variable-variabel penelitian.

#### **3.7.2 Uji Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas)**

Syarat penting sebuah kuesioner adalah valid dan reliabel. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaannya mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2005).

Tabel 3.1  
Variabel dan Indikator *Fraud Audit* dan *Fraud Auditor*

Variabel	Indikator
<b>Fraud Audit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari fakta material dan non material.</li> <li>2. Mencari motif &amp; kesempatan pelaku kecurangan.</li> <li>3. Mencari gambaran kasus kecurangan</li> <li>4. Membedakan kekeliruan dengan kecurangan</li> <li>5. Penyelidikan awal</li> <li>6. Menyusun rencana kerja</li> <li>7. Mengembangkan rencana kerja</li> <li>8. Merumuskan tujuan</li> <li>9. Mengembangkan metodologi penyelesaian</li> <li>10. Inspeksi terhadap bukti asli</li> <li>11. Mencari informasi ekonomi</li> <li>12. Mencari informasi kekayaan pelaku</li> <li>13. Penggunaan Teknik investigasi</li> <li>14. Mencari bukti dari ahli</li> <li>15. Membuat analisis matematik dan statistic</li> <li>16. Membandingkan data keuangan dengan fakta</li> <li>17. Membandingkan data masa lalu dengan fakta</li> <li>18. Menyiapkan laporan berdasar sumber penugasan</li> <li>19. Menyiapkan laporan berdasar cakupan penyelidikan</li> <li>20. Menyiapkan laporan dengan pendekatan <i>fraud</i></li> <li>21. Keterbatasan cakupan</li> <li>22. Hasil temuan</li> <li>23. Menjadi saksi ahli di peradilan</li> <li>24. Perluasan tanggung jawab auditor</li> </ol>
<b>Fraud Auditor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi Detektor kecurangan</li> <li>2. Curiga profesional</li> <li>3. Sikap fraud auditor</li> <li>4. Pengetahuan dan pengalaman</li> <li>5. Keahlian non teknis</li> <li>6. Pengetahuan menghitung kerugian kecurangan</li> <li>7. Keahlian audit umum dan khusus</li> <li>8. Menjadi fraud auditor</li> <li>9. Investigator khusus fraud</li> </ol>

*Sumber data kuesioner: Zysman dalam Soenoesoebrota (1997).*

Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran validitas adalah *construct validity*, dilakukan dengan mengkorelasikan *bivariate* antara masing-masing indikator dengan total skor variabel dengan tingkat signifikansi 5% Ghozali (2005). Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran reliabilitas adalah konsistensi internal dilakukan dengan cara *One Shoot* atau pengukuran sekali saja, kemudian jawaban responden diuji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Dikatakan reliabel jika *alpha* diatas 0,60 (Nunmally 1967 dalam Ghozali (2005).

### 3.7.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data sampel dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengujinya dilakukan skor Z. Suatu distribusi bisa dikatakan distribusi normal, bila nilai Z terletak antara -1,96 sampai dengan +1,96 dengan signifikansi 5%. Uji normalitas tidak diperlukan dalam penelitian ini karena datanya dalam bentuk skala *likert*.

### 3.7.4 Analisis Data Pengujian Hipotesis

Analisis ini untuk menguji persepsi ketiga kelompok responden yang saling independen, analisis ini menggunakan uji *One Way Anova* dengan bantuan SPSS dengan tingkat signifikansi 5 persen. Pengujian ini untuk menjawab hipotesis satu dan dua.

Hipotesis satu mengenai penugasan audit kecurangan (*fraud audit*) dan hipotesis dua mengenai profil auditor kecurangan (*fraud auditor*).

### **3.8 Sistematika Pembahasan**

Bab I membahas fenomena empiris dan deskripsi pemikiran yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Uraian mengenai latar belakang masalah, selanjutnya menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah pokok yang akan diteliti. Bab II dibahas telaah pustaka dan perumusan hipotesis, khususnya teori dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan peneliti untuk merumuskan hipotesis penelitian. Bab III dibahas metode penelitian yang meliputi unit analisis, jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel prosedur pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode analisis data. Kemudian secara detil memaparkan analisis data untuk menguji hipotesis diuraikan dalam Bab IV. Akhirnya Bab V membahas tentang kesimpulan, implikasi dan saran dari hasil penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan atau persamaan persepsi antara Auditor Internal, Akuntan Publik dan Auditor Pemerintah terhadap penugasan *fraud audit* dan profil *fraud auditor* saat mereka menjalankan tugas pemeriksaan. Hasil penelitian meliputi gambaran umum responden, uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari validitas dan reliabilitas, uji *non response bias*, uji hipotesis dengan *independent samples t-test*, serta pembahasan dan analisis.

#### **4.1 Statistik Deskriptif**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Responden**

Responden dalam penelitian ini Auditor Internal yang bekerja di perusahaan, Akuntan Publik yang bekerja di KAP dan Auditor Pemerintah yang bekerja di BPK. Karakteristik dari 153 responden yang diobservasi akan digambarkan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dipahami. Gambaran umum mengenai responden disajikan untuk melihat profil serta karakteristik dari data penelitian ini. Adapun Profil dari 153 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1  
Profil Responden

Keterangan	Jumlah Responden	%
<b>Gender:</b>		
Pria	104	68%
Wanita	49	32%
Jumlah	153	100%
<b>Level Pendidikan:</b>		
D III/D IV	28	18%
SI	118	77%
S2	7	5%
Jumlah	153	100%
<b>Jurusan Pendidikan:</b>		
Akuntansi	135	88%
Non Akuntansi	18	12%
Jumlah	153	100%
<b>Masa Kerja</b>		
Kurang dari 5 tahun	109	71%
Lebih dari 5 tahun	44	29%
Jumlah	153	100%
<b>Wilayah (Cakupan) Kerja:</b>		
Internasional	5	3%
Nasional	121	79%
Provinsi/Kabupaten/Kota	27	18%
Jumlah	153	100%
<b>Kelompok Auditor :</b>		
Auditor Internal	33	22%
Auditor Eksternal (Akuntan Publik)	66	43%
Auditor Pemerintah	54	35%
Jumlah	153	100%

Sumber : data primer diolah 2007

Dari tabel 4.1, berdasarkan gender dapat dilihat responden laki-laki berjumlah 104 sedangkan 49 responden adalah wanita. Persentase responden laki-laki sebesar 68 persen sedangkan wanita sebesar 32 persen dari jumlah total 153 responden. Tingkat pendidikan terdiri dari 28 orang untuk level pendidikan Diploma III/IV, 118 orang untuk Sarjana Strata 1 dan 7 orang Strata 2 dimana persentasenya adalah 18 persen DIII/IV, 77 persen S1 dan 5 persen S2. Dari data tersebut, mayoritas sampel auditor berpendidikan S1. Latar belakang jurusan pendidikan terdiri dari 135 responden jurusan akuntansi dan 18 orang dari jurusan non akuntansi, kebanyakan yang non akuntansi dari jurusan IT dan hukum. Persentase berdasarkan latar

belakang pendidikan adalah 88 persen dari jurusan akuntansi dan 12 persen jurusan non akuntansi.

Berdasarkan masa kerja, auditor yang bekerja kurang dari 5 tahun sebesar 109 atau 71%, sedangkan yang telah bekerja dan lebih dari 5 tahun sebanyak 44 orang atau 29%. Dari data cakupan wilayah kerja auditor, yang memiliki cakupan kerja internasional sebanyak 5 orang atau 3%, nasional sebanyak 121 orang atau 79% dan provinsi /kabupaten/kota sebanyak 27 responden atau 18% dari 150.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat responden dari kelompok Auditor Internal sebanyak 33 responden dengan persentase sebesar 22%, Akuntan Publik sebanyak 66 atau 43%, dan Auditor Pemerintah sebanyak 54 orang atau sebesar 35%, dari jumlah total 150 responden.

#### **4.1.2. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

Kuesioner dikirim kepada auditor sebanyak 400 dan tidak kembali masing-masing sebanyak 115 dari Auditor Internal, 80 dari Akuntan Publik dan 45 dari Auditor Pemerintah sehingga totalnya menjadi 243 kuesioner. Dari jumlah yang kembali, terdapat sebanyak 7 kuesioner yang tidak dapat diproses karena tidak lengkap atau tidak utuh terdiri dari 2 jawaban dari Auditor Internal, 4 jawaban dari Akuntan Publik dan 1 dari Auditor Pemerintah. Dengan demikian kuesioner kembali yang dapat digunakan adalah 33 dari Auditor Internal, 66 dari Akuntan Publik dan 54 dari Auditor Pemerintah sehingga totalnya menjadi 153 kuesioner.

Tabel 4.2  
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner  
Terhadap Responden

Keterangan	Auditor Internal	Akuntan Publik	Auditor Pemerintah
<b>Total Pengiriman Kuesioner</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
Kuesioner tidak kembali	-115	-80	-45
Kuesioner kembali	35	70	55
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	-2	-4	-1
<b>Kuesioner dapat digunakan</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>54</b>
Kuesioner lengkap kembali sebelum tanggal 30 Mei 2007	25	51	54
Kuesioner lengkap kembali setelah tanggal 30 Mei 2007	8	15	0
<i>Response rate</i>	22%	44%	54%

*Sumber : data Primer diolah 2007*

Dari data di atas *response rate* untuk Auditor Internal sebesar 22%, Akuntan Publik sebesar 44% dan Auditor Pemerintah sebesar 54% sehingga rata-rata *response rate* sebesar 38% rincian lengkap dapat dilihat pada tabel 4.2. Dikarenakan ada permintaan dari sebagian responden, dimana mereka bersedia mengisi kuesioner dengan syarat nama dan instansi tempat mereka bekerja dirahasiakan, maka kami mengemukakan data tidak menyebut nama perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 yang menyajikan rincian sampel dan response kuesioner dari auditor internal dapat dibaca bahwa perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 25 perusahaan, yakni 19 perusahaan merupakan perusahaan terbuka atau *go public*, sisanya 6 perusahaan belum terbuka.

Tabel 4.3  
Rincian Sampel dan *Response* Kuesioner  
Kelompok Auditor Internal

No	Perusahaan (Tbk/Non Tbk)	Sektor	Lokasi	Cakupan Usaha	Sampel	<i>Response</i>
1	Perusahaan – Tbk	Manufaktur	Cilegon	Banten	6	1
2	Perusahaan -Non Tbk	Manuf.-Otomotif	Jakarta	DKI – Jabar	6	3
3	Perusahaan – Tbk	Telekomunikasi	Jakarta	Nasional	6	
4	Perusahaan – Tbk	Perdag.-Otomotif	Jakarta	Nasional	6	
5	Perusahaan – Tbk	Perdag.-Otomotif	Jakarta	Nasional	6	
5	Perusahaan – Tbk	Perdag.-Otomotif	Jakarta	Nasional	6	3
7	Perusahaan -Non Tbk	Consumer Good	Jakarta	Nasional	6	
8	Perusahaan -Non Tbk	Manufaktur	Jakarta	Jawa Timur	6	
9	Perusahaan -Non Tbk	Manufaktur-Kimia	Jakarta	DKI	6	1
10	Perusahaan -Non Tbk	Elektronik	Jakarta	Nasional	6	
11	Perusahaan -Non Tbk	Consumer Good	Jakarta	Nasional	6	
12	Perusahaan – Tbk	Aneka Industri	Jakarta	Nasional	6	5
13	Perusahaan – Tbk	Telekomunikasi	Jakarta	Nasional	6	2
14	Perusahaan – Tbk	Otomotif	Jakarta	Nasional	6	6
15	Perusahaan – Tbk	Manufaktur-Semen	Jakarta	Nasional	6	1
16	Perusahaan – Tbk	Konstruksi	Jakarta	Nasional	6	3
17	Perusahaan – Tbk	Konstruksi	Jakarta	Nasional	6	5
18	Perusahaan – Tbk	Leasing	Jakarta	Nasional	6	1
19	Bank-Tbk	Perbankan	Jakarta	Nasional	6	2
20	Bank-Tbk	Perbankan	Jakarta	Nasional	6	1
21	Bank-Tbk	Perbankan	Jakarta	Nasional	6	
22	Bank-Tbk	Perbankan	Jakarta	Nasional	6	
23	Bank-Tbk	Perbankan	Jakarta	Nasional	6	1
24	Bank-Tbk	Perbankan	Jakarta	Nasional	6	
25	Perusahaan – Tbk	Manuf.-Makanan	Surabaya	Jawa Timur	6	
	Kuesioner kembali				<b>150</b>	<b>35</b>
	Tidak lengkap					2
	Responden digunakan					33

Tabel 4.4  
Rincian Sampel dan *Respose* Kuesioner  
Auditor Eksternal

No	KAP	Cakupan Usaha	Lokasi	Sampel	Response
1	KAP Nasional	Nasional	Bandung	4	3
2	KAP Nasional	Nasional	Bandung	4	
3	KAP Nasional	Nasional	Bandung	4	3
4	KAP Nasional	Nasional	Bandung	4	
5	KAP Afiliasi Asing	Internasional	Jakarta	25	24
6	KAP Afiliasi Asing	Internasional	Jakarta	25	23
7	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
8	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
9	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
10	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
11	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	3
12	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
13	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
14	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	2
15	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
16	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
17	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	2
18	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
19	KAP Nasional	Nasional	Jakarta	4	
20	KAP Nasional	Nasional	Semarang	4	
21	KAP Nasional	Nasional	Semarang	4	
22	KAP Afil Asing-Cabang	Nasional	Surabaya	4	4
23	KAP Nasional	Nasional	Surabaya	4	
24	KAP Nasional	Nasional	Surabaya	4	4
25	KAP Nasional	Nasional	Surabaya	4	
26	KAP Nasional	Nasional	Yogyakarta	4	2
27	KAP Nasional	Nasional	Yogyakarta	4	
				<b>150</b>	
	Jumlah Kuesioner kembali				<b>70</b>
	Tidak lengkap				4
	Responden digunakan				66

Tabel 4.5  
Rincian Sampel dan *Response* Kuesioner  
Auditor Pemerintah

No	Kantor BPK	Cakupan Kerja	Sampel	Response
1	BPK Kantor Pusat Jakarta	Nasional dan instansi di LN	70	48
2	BPK Bandung	Jawa Barat	10	0
3	BPK Yogyakarta	Jateng – DIY	10	2
4	BPK Surabaya	Jawa Timur	10	5
			<b>100</b>	
	Kuesioner kembali			<b>55</b>
	Tidak lengkap			1
	Responden digunakan			54

Sampel terbanyak adalah perusahaan perbankan yakni 6 ditambah 1 perusahaan *leasing*. Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, baik manufaktur dan perdagangan mobil maupun perdagangan *spare part* terwakili 5 perusahaan. Sisanya perusahaan, telekomunikasi, konstruksi, aneka industri dan lain-lain. Hampir semua perusahaan tersebut berkantor pusat di Jakarta yakni 23 perusahaan, hanya terdapat 2 yang tidak, masing-masing 1 di Surabaya, dan satunya lagi di Cilegon. Jika melihat dalam tabel, *response* dari sampel tersebut belum merata. *Response* terbanyak dari perusahaan otomotif dan konstruksi. Perusahaan perbankan memberi respon sedikit sebanyak 4 dari total 36 sampel.

Rincian sampel dan *response* dari auditor eksternal seperti tercantum dalam tabel 3.4 menunjukkan bahwa sampel dikelompokkan menjadi 2 grup, yakni grup pertama Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan asing sebanyak 2 ditambah 1 cabangnya di Surabaya, dengan sampel sebanyak 54, dan 24 KAP nasional / lokal dengan sampel sebanyak 96. Sebaran sampel berdasar kota terdiri dari Jakarta 15, Surabaya 4, Bandung 4, Yogyakarta dan Semarang masing-masing 2 KAP. Jumlah response terbesar dari 2 KAP besar yang berafiliasi dengan asing yang berkantor di Jakarta dan satu cabang di Surabaya yakni sebanyak 52, sisanya 12 dari KAP yang tersebar dari kota lain, yakni Surabaya 4, Bandung 6, sisanya Jakarta, Yogyakarta dan Semarang.

Dari tabel 4.5 yang memperlihatkan sampel dan response dari auditor pemerintah dapat dilihat bahwa response terbesar datang dari auditor yang berkantor di BPK pusat sebanyak 48 responden, sisanya 7 dari Surabaya dan Yogyakarta. Hal ini wajar karena sebanding dengan jumlah kuesioner yang dikirim.

## 4.2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi realibilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,60 (Nunnaly, 1967 dalam Imam, 2005). Hasil secara lengkap uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 2 SPSS. Data rekapitulasi hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**

### Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Fraud Audit	0,751	Reliabel
2	Fraud Auditor	0,763	Reliabel

*Sumber: data primer diolah 2007*

Variabel *fraud audit* mempunyai nilai *cronbach alpha* 0,751. Nilai tersebut di atas 0,6, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan tentang *fraud audit* sebanyak 24 item adalah reliabel. Variabel *fraud Auditor* mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar 0,763, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan *fraud auditor* sebanyak 9 item adalah reliabel.

Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate (pearson correlation)* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Kisaran Korelasi	Kisaran Signifikansi	Keterangan
1	<i>Fraud Audit</i>	0,382**-0,820**	0,000 - 0,000	Valid
2	<i>Fraud Auditor</i>	0,423**-0,828**	0,000 - 0,000	Valid

Sumber: data primer diolah 2007

Variabel *fraud audit* mempunyai kisaran korelasi antara 0,382 sampai dengan 0,820 dan signifikan pada tingkat 0,000 sampai dengan 0,000 menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur *fraud audit* dapat dikatakan valid. Demikian juga variabel *fraud auditor* berada pada kisaran korelasi 0,423 sampai dengan 0,828 dan signifikan pada tingkat 0,000 sampai dengan 0,000 mengindikasikan masing-masing indikator pertanyaan sudah valid.

### 4.3. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan *One Way Anova*. Uji beda *One Way Anova* bertujuan untuk menentukan apakah dua kelompok sampel atau lebih yang tidak berhubungan memiliki rata-rata sama atau berbeda

**Tabel. 4.8**  
**Data Pengujian Hipotesis**

Kelompok Auditor	F-Hitung 0,05	F-Tabel 0,05	Mean	Sig	Df	Persepsi	Hipotesis
FRAUD AUDIT Internal – External – Government Auditor	1,150	3,06	601,402	0,319	150	Tdk ada perbedaan	Diterima
FRAUD AUDITOR Internal - External- Government Auditor	1,023	3,06	83,781	0,362	150	Tdk ada perbedaan	Diterima

Sumber : data yang diolah 2007



Tabel 4.9  
Uji *One Way Anova*  
Persepsi Auditor terhadap Penugasan Fraud Audit

**Descriptives**

TOTAL\_X

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					INTERNAL	33		
EKSTERNAL	66	185,55	25,690	3,162	179,23	191,86	135	228
PEMERINTAH	54	180,28	21,483	2,923	174,41	186,14	148	222
Total	153	184,00	22,887	1,850	180,34	187,66	135	228

**Test of Homogeneity of Variances**

TOTAL\_X

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,252	2	150	,289

**ANOVA**

TOTAL\_X

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1202,803	2	601,402	1,150	,319
Within Groups	78417,197	150	522,781		
Total	79620,000	152			

Tabel 4.10  
Uji *One Way Anova*  
Persepsi Auditor terhadap Profil *Fraud Auditor*

**Descriptives**

TOTAL\_Y

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					INTERNAL	33		
EKSTERNAL	66	69,45	9,904	1,219	67,02	71,89	46	86
PEMERINTAH	54	68,72	9,158	1,246	66,22	71,22	50	88
Total	153	69,65	9,050	,732	68,20	71,09	46	88

### Test of Homogeneity of Variances

TOTAL\_Y

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,278	2	150	,282

### ANOVA

TOTAL\_Y

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	167,562	2	83,781	1,023	,362
Within Groups	12281,379	150	81,876		
Total	12448,941	152			

#### 4.3.1 Hasil Uji Hipotesis Satu

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah terhadap penugasan *fraud audit* saat mereka menjalankan tugas pemeriksaan. Dibuktikan dengan F hitung sebesar 1,150 sedangkan F tabel sebesar 3,06. Angka F hitung lebih kecil dari pada angka F tabel sehingga Hipotesis satu diterima. Kondisi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang hampir sama, namun hanya menyertakan dua kelompok auditor yang dibuat Enawati (2005) dimana tidak adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok auditor internal dan auditor eksternal. Hal ini mengindikasikan, meskipun mereka memiliki struktur organisasi, cakupan kerja, klien, pedoman audit dan *job description* yang berbeda, namun mereka memiliki pandangan yang sama terhadap penugasan *fraud audit* saat mereka menjalankan melakukan pemeriksaan. Auditor internal yang selama ini dikenal masyarakat paling berani dalam mengungkap *fraud* karena tidak memiliki kepentingan (*interest*) terhadap klien atau auditee yang diperiksa, juga bisa masuk ke

semua lini perusahaan dibanding auditor lain, ternyata memiliki persepsi yang sama dengan kelompok auditor lain.

#### **4.3.2 Hasil Uji Hipotesis Dua**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah terhadap profil *fraud auditor* saat mereka menjalankan tugas pemeriksaan. Dibuktikan dengan F hitung sebesar 1,023 sedangkan F tabel sebesar 3,06. Angka F hitung lebih kecil dari pada angka F tabel sehingga Hipotesis satu diterima. Kondisi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang hampir sama, tetapi hanya menyertakan dua kelompok auditor yang dibuat Enawati (2005) dimana tidak adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok auditor internal dan auditor eksternal. Hal ini mengindikasikan, meskipun mereka memiliki struktur organisasi, cakupan kerja, klien, pedoman audit dan *job description* yang berbeda, namun mereka memiliki kemauan yang sama untuk menjadi *fraud auditor* saat mereka menjalankan tugas pemeriksaan.

#### **4.4 Ukuran Persepsi Auditor dan Analisis Faktor yang Mempengaruhi**

Salah satu pengaruh yang paling besar terhadap jawaban kuesioner oleh responden adalah apakah ia selama ini bekerja sebagai auditor yang sering berhubungan langsung dengan klien ataukah hanya petugas audit klerikal yg jarang berhubungan dengan orang. Jika kondisinya seperti ini, kemungkinan jawaban-jawaban yang diberikan belum mengarah ke *investigative audit*. Seperti terlihat dalam tabel 4.9 dan 4.10, yang menampilkan hasil nilai rata-rata persepsi tiap indikator *fraud audit* dan *fraud auditor*, menunjukkan bahwa rata-rata nilai persepsi mereka cukup tinggi, yakni untuk persepsi *fraud audit*, kelompok audit internal

sebesar 7,79, akuntan publik sebesar 7,73, dan auditor pemerintah sebesar 7,51. Sedangkan persepsi fraud auditor, hasilnya juga cukup tinggi, dimana kelompok auditor internal sebesar 7,95, akuntan publik sebesar 7,72 dan auditor pemerintah sebesar 7,64.

Tabel. 4.11  
Nilai Persepsi Auditor terhadap  
Indikator *Fraud Audit*

Kues	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13
Internal	7,0 9	6,9 1	6,9 1	8,0 0	8,1 8	8,4 5	8,0 9	8,5 5	8,6 4	8,7 3	7,9 1	6,9 1	8,0 0
Eksternal	8,0 9	6,7 7	7,0 9	8,1 8	7,9 1	7,8 6	8,4 1	8,5 9	8,2 3	8,0 9	7,4 5	6,7 7	6,4 1
Pemerintah	7,2 2	5,7 8	7,0 0	7,3 3	7,2 2	7,8 9	8,1 1	8,4 4	7,1 1	8,2 8	7,7 2	6,5 6	7,3 9
Rata-Rata	7,4 7	6,4 9	7,0 0	7,8 4	7,7 7	8,0 7	8,2 0	8,5 3	7,9 9	8,3 7	7,7 0	6,7 5	7,2 7

Kues	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Rata
Internal	7,45	6,45	8,0 0	8,0 0	8,0 0	10,0 0	9,0 0	8,0 0	8,0 0	8,0 0	8,0 0	7,7 9
Eksternal	7,77	7,5	7,0 0	2,0 0	4,0 0	4,0 0	7,0 0	8,0 0	8,0 0	6,0 0	6,0 0	7,7 3
Pemerintah	7,22	7,61	8,1 7	7,7 8	8,3 9	7,7 8	7,9 4	8,1 7	7,7 2	6,8 3	6,6 1	7,5 1
Rata-Rata	7,48	7,19	7,7 2	5,9 3	6,8 0	7,2 6	7,9 8	8,0 6	7,9 1	6,9 4	6,8 7	

Sumber: Data primer diolah 2007

Tabel. 4.12  
Nilai Persepsi Auditor terhadap  
Indikator *Fraud Auditor*

Kues	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Rata
Internal	7,8 2	8,0 9	8,3 6	8,5 5	8,6 4	7,9 1	7,1 8	7,1 8	7,8 2	7,9 5
Eksternal	6,9 5	7,3 2	8,1 8	8,5 0	8,6 4	8,1 4	6,2 7	7,8 2	7,6 4	7,7 2
Pemerintah	7,6 1	7,3 3	8,2 2	7,7 8	7,9 4	7,8 3	6,6 1	7,2 2	8,1 7	7,6 4
Rata-Rata	7,4 6	7,5 8	8,2 6	8,2 7	8,4 1	7,9 6	6,6 9	7,4 1	7,8 7	

Sumber: Data primer diolah 2007

Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh sisi dalam (internal) maupun sisi luar (eksternal) auditor dalam mempersepsikan *fraud audit* maupun *fraud auditor*. Faktor dalam dipengaruhi oleh sikap, dimana auditor masih memiliki idealisme terhadap

pekerjaan dan profesinya, independen dalam melaksanakan tugas, tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk fraud terutama yang mempengaruhi kinerja. Pengaruh lainnya adalah kepentingan, yakni auditor tidak merasa terbebani oleh klien terutama akuntan publik, dimana *fee* berasal dari klien, dorongan untuk menciptakan GCG, serta didukung kepentingan pribadi lainnya. Pengaruh motif, dimana auditor ingin berprestasi, merasa puas jika berhasil membongkar fraud. Pengaruh pengalaman, dimana auditor pernah mengungkap *fraud* atau belum, merasakan dampak akibat *fraud*, belum pernah dicoba disuap oleh pelaku *fraud*, dan sudah pernah atau belum menerima sanksi akibat tidak bisa mendeteksi *fraud*. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi auditor yakni harapan, dimana apakah auditor memiliki harapan terhadap perekonomian yang bersih dan akuntabel, harapan perusahaan menjadi maju dengan nilai kapitalisasi saham yang tinggi, serta kesejahteraan pegawai meningkat. Pengalaman kerja juga sangat mempengaruhi persepsi auditor tentang fraud dimana kemungkinan pegawai yang baru saja lulus kuliah dan relatif baru bekerja, akan melihat fraud bukan merupakan

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya yang berhubungan dengan regulasi yakni kode etik auditor dimana semakin berkeinginan kuat auditor memegang kode etik, semakin besar nilai persepsi mereka terhadap kuesioner ini, standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi pemerintah, standar pelaksanaan audit, undang-undang atau peraturan lain yang menyangkut GCG, kebijakan pemerintah atau otoritas, serta kebijakan organisasi. Semakin kuat peraturan dan semakin tinggi sanksi yang diberikan jika melakukan kesalahan, maka akan mendorong auditor melakukan tugas pemeriksaan semakin baik. Pengaruh persepsi auditor juga datang dari *auditee* atau klien, yakni sikap dan integritas manajemen, dimana semakin tinggi manajemen memegang teguh integritas, semakin

mudah auditor menjalankan tugas pemeriksaannya, struktur pengendalian, jenis dan ukuran entitas, budaya pegawai dan organisasi, visi misi dan tujuan entitas, serta teknologi yang diterapkan *auditee*. Faktor eksternal ketiga yang mempengaruhi yakni tingkat persaingan perusahaan, dimana semakin tinggi tingkat persaingan perusahaan, ada kemungkinan risiko semakin tinggi, juga kemampuan ekonomi masyarakat, ketaatan terhadap sistem hukum, sistem ekonomi nasional atau global serta perkembangan teknologi.

#### **4.5 Pembahasan**

Penelitian ini juga senada dengan penelitian IFAC (2004) dalam Bartkova (2005) dimana 47% kejahatan ekonomi berhasil dideteksi oleh auditor. Juga mendukung penelitian Riyadeni (2003) terhadap akuntan publik, dimana hasil penelitiannya menyatakan meskipun mendapat tekanan waktu dan kompleksitas tugas, perhatian auditor terhadap fraud tidak berkurang. Penelitian oleh *Ernst & Young* dalam survey tahun 2006 menyatakan bahwa internal audit menduduki urutan nomor dua dalam mendeteksi fraud setelah internal kontrol. Penelitian yang menyangkut fraud yang mendukung penelitian ini juga dari KPMG, dimana hasil penelitian tersebut mengutarakan organisasi yang memiliki fungsi internal audit lebih memungkinkan mendeteksi dan melaporkan fraud dari pada yang tidak memiliki fungsi ini.

Persepsi dari tiga kelompok auditor terhadap tindakan *fraud audit* maupun sosok *fraud auditor* selaras dengan *Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99 - Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* diterbitkan Desember 2002 sebagai pengganti *SAS No. 82* menyatakan bahwa: “*The auditor has responsibility to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the*

*financial statements are free of material misstatement, whether caused by error or fraud*". "Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan".

Auditor pemerintah, dengan rata-rata jawaban kuesioner ini yang cukup tinggi, berarti sesuai dengan pasal 9 huruf b undang-undang BPK, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah. Juga sesuai pasal 31 yang mewajibkan BPK dan atau pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK dan atau pemeriksa berkewajiban menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan mematuhi kode etik Pemeriksa serta melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Penjelasan mengenai jawaban tiap indikator *fraud audit* maupun *fraud auditor* dalam pertanyaan atau pernyataan oleh responden dapat dijabarkan sebagai berikut. Kuesioner yang menanyakan pertemuan auditor dengan klien bisa mendapatkan gambaran mengenai fakta material maupun non material yang terjadi selama ini, dipersepsikan oleh auditor internal rata-rata sebesar 7,07, oleh akuntan publik sebesar 8,09, sedangkan auditor pemerintah sebesar 7,22. Nilai akuntan publik paling tinggi kemungkinan disebabkan oleh seringnya akuntan publik memanfaatkan wawancara dengan klien untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Berikutnya, pertemuan auditor dengan klien bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaku kecurangan termasuk motif, rasionalitas dan kesempatan pelaku dipersepsikan rata-rata oleh auditor internal sebesar 6,91, oleh akuntan publik

6,77, bahkan auditor pemerintah hanya 5,78. Angka di atas menunjukkan rata-rata yang rendah karena kemungkinan mereka belum bisa menangkap gambaran pelaku fraud sebelum mempelajari bukti. Jadi kalau hanya wawancara dengan klien belum bisa membuat gambaran.

Selanjutnya, jika auditor disodori pertanyaan pertemuan auditor dengan klien bisa mendapatkan gambaran mengenai isu kasus yang dibahas masuk akal atau tidak, dengan menilai tingkat emosi yang diekspresikan klien, mereka memberi nilai 6,91 untuk internal auditor, 6,77 untuk akuntan publik dan 7,00 untuk auditor pemerintah. Ketiganya memberi penilaian hampir sama, mereka menganggap semakin emosional klien menceritakan kasus kecurangan, kemungkinan besar kasusnya mendekati kebenaran. Pertanyaan berikutnya, tentang membedakan *error* dan *fraud*, yakni apakah auditor dalam melakukan pengecekan konflik terhadap klien, pelaku kecurangan serta pihak ketiga, perlu disertai dengan kemampuan membedakan kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*), hasilnya menunjukkan auditor internal rata-rata 8,00, akuntan publik sebesar 8,18, dan auditor pemerintah 7,33. Nilai ketiganya dalam pertanyaan ini tinggi karena seorang auditor harus bisa membedakan antara kekeliruan dengan kecurangan. Pertanyaan berikutnya tentang penyelidikan awal, yaitu auditor melakukan penyelidikan awal dengan mencari isu kasus secara lengkap dan rinci untuk meyakinkan diri dan memenuhi tes realitas bisnis, auditor internal memberi nilai 8,18, akuntan publik memberi nilai rata-rata 7,91 dan auditor pemerintah memiliki nilai rata-rata 7,22.

Selanjutnya untuk pertanyaan dalam melakukan audit, auditor mencari bukti-bukti yang relevan yang berhubungan dengan informasi ekonomi, auditor internal memberi nilai rata-rata 7,91, akuntan publik sebesar 7,45 dan auditor pemerintah memberi nilai 7,72. Pertanyaan mengenai penyelidikan harta, dalam melakukan



audit, auditor mencari bukti relevan yang berhubungan dengan harta / kekayaan pelaku kecurangan, dijawab oleh internal sebesar 6,91, akuntan publik sebesar 6,77 dan auditor pemerintah sebesar 6,56. Rata-rata angka ini termasuk sedang, menurut mereka auditor belum perlu secara detil mengaitkan harta seseorang dengan kecurigaan *fraud*.

Pertanyaan nomor 13 sangat kental nuansa fraud auditnya, yakni dalam melakukan audit, auditor mencari bukti dengan teknik investigasi (penyamaran, wawancara, merayu, merekam, membaca bahasa tubuh) terhadap pihak terkait untuk membuktikan kebenaran dan kejujuran pelaku kecurangan, auditor internal memberikan angka rata-rata 8,00, akuntan publik menilai 6,41 dan auditor pemerintah 7,39. Nilai rata-rata akuntan publik rendah kemungkinan karena persoalan penugasan. Kalau bentuk penugasan bersifat investigatif, kemungkinan pendapat mereka beda. Atau bisa juga mereka merasa harus menjaga hubungan dengan klien, jadi kalau penugasan general audit sang auditor melakukan audit investigatif, kemungkinan klien malah kurang berkenan. Pertanyaan tentang kesediaan auditor menjadi saksi ahli, apakah auditor bersedia menjadi saksi ahli di pengadilan dengan menyediakan dukungan bukti, jawaban auditor internal sebesar 8,09, akuntan publik sebesar 6,73 dan auditor pemerintah sebesar 6,83. Mereka masih masih berniat ingin membantu proses hukum yang berjalan.

Jawaban atas pertanyaan, auditor harus mempunyai semua sikap berikut tanpa kecuali: curiga adanya kecurangan, memeriksa kecurangan material maupun non material, melihat/mendeteksi adanya kecurangan, dan mewaspadaai setiap pelaku kecurangan, internal audit memberi penilaian 8,09, akuntan publik 7,32 dan auditor pemerintah 7,33. Jawaban atas pertanyaan nomor 28 yang menyatakan auditor harus

mempunyai semua keahlian teknis ini tanpa kecuali: pengetahuan umum dan khusus, pengalaman, mendapat informasi relevan, teliti dan menggunakan metode analisis, dijawab para auditor dengan nilai rata-rata 8,27 dengan rincian dari internal sebesar 8,55, akuntan sebesar 8,50 dan auditor pemerintah sebesar 7,78. Nilai rata-rata ini merupakan urutan nomor 2 untuk persepsi fraud auditor. Kemudian disusul pertanyaan auditor harus mempunyai semua keahlian non teknis tanpa kecuali : Tanggung jawab, adaptif, berpikir analitis, logis, cepat, rinci, independen, objektif, mampu berkomunikasi, memimpin dan bekerja sama, jawaban mereka sangat tinggi. Pertanyaan ini berkisar tentang ciri khas auditor yang ideal. Rata-rata jawaban ketiganya adalah 8,64, 8,64 dan 7,94.

Pertanyaan nomor 30 yang menanyakan apakah auditor harus mempunyai semua pengetahuan ini tanpa kecuali: cara mengumpulkan bukti, menghitung kerugian atas kecurangan, memahami isi kontrak atau perjanjian klien, dan tujuan dari kejahatan, dijawab dengan rata-rata nilai internal, akuntan dan pemerintah masing-masing 7,91, 8,14 dan 7,83. Selanjutnya pertanyaan auditor internal, auditor eksternal dan auditor pemerintah dapat melakukan fungsi sebagai auditor atas kecurangan dijawab dengan nilai 7,18, 7,82, dan 7,22. Hal ini menunjukkan mereka mau ditugaskan menjadi fraud auditor. Sedangkan pertanyaan terakhir yang ingin minta pendapat para auditor yakni diperlukan auditor khusus dalam mendeteksi kecurangan (*fraud audit*) selain auditor internal, auditor eksternal maupun auditor pemerintah, mereka menjawab dengan nilai rata-rata gabungan 7,87, dimana auditor internal sebesar 7,82, akuntan publik 7,64 dan auditor pemerintah 8,17. Jawaban ini menggambarkan, dalam keadaan tertentu, sebaiknya yang ditugaskan untuk melakukan investigasi *fraud* adalah pihak lain saja atau auditor khusus.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis data dengan menggunakan alat uji *One Way Anova SPSS*, untuk membuktikan hipotesis 1 dan 2 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Hipotesis 1 yang menyatakan tidak ada perbedaan persepsi antara auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah terhadap penugasan *Fraud Audit*, diterima, berdasarkan angka yang ditunjukkan dalam F hitung 1,150 dan F tabel 3,06 pada tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis 2 yang menyatakan tidak ada perbedaan persepsi antara auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah terhadap profil *Fraud Auditor* diterima berdasarkan angka yang ditunjukkan dalam F hitung 1,023 dan F tabel 3,06 pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya oleh Enawati (2005), meskipun berbeda lokasi yakni hanya di Jawa Tengah dan hanya menyertakan 2 kelompok auditor yang diteliti, yang menyimpulkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara auditor internal dan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan.

Rata-rata persepsi dari ketiga kelompok auditor tersebut tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok auditor sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkap *fraud* pada entitas yang sedang mereka audit, serta memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi auditor kecurangan (*fraud auditor*) saat mereka menjalankan tugas pemeriksaan. Penelitian ini juga senada

dengan survey yang dilakukan IFAC (2004), dimana menyimpulkan bahwa 47% kejahatan ekonomi berhasil dideteksi oleh *internal audit* dan *external audit*.

## 5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini, sangat mendukung *Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99 - Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* pengganti SAS No. 82 menyatakan bahwa: “*The auditor has responsibility to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether caused by error or fraud*”. “Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan”.

Merujuk pada teori pengharapan dalam persepsi, auditor memiliki harapan yang tinggi terhadap keberhasilan suatu entitas dimana indikasi keberhasilan adalah terciptanya sistem ekonomi yang sehat dan akuntabel, nilai saham dan laba perusahaan meningkat, sistem pengendalian manajemen berjalan baik, kesejahteraan pegawai meningkat, serta organisasi memiliki manfaat nilai lebih dimata *stakeholders*. Harapan tersebut akan mendukung kinerja auditor saat menjalankan tugas pemeriksaan, khususnya audit mencegah, mendeteksi dan melaporkan kecurangan.

### 5.3 Implikasi Praktek

Implikasi praktek yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini adalah bahwa:

1. Kenyataan membuktikan bahwa persepsi para auditor, baik dari kelompok auditor internal, akuntan publik maupun auditor pemerintah terhadap penugasan *fraud audit* maupun profil *fraud auditor* sama tingginya. Hal ini menunjukkan mereka sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk mendeteksi, mencegah dan menginvestigasi kecurangan yang ada pada entitas yang sedang mereka periksa, serta berkeinginan kuat untuk menjadi *fraud auditor* saat menjalankan tugasnya. Harapannya, pihak regulator maupun pihak-pihak yang berkompeten terhadap kinerja auditor, supaya dapat mengakomodasi kenyataan di atas, agar dapat mendorong terciptanya para auditor yang lebih profesional, independen dan lebih menjamin laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan kecurangan.
2. Masyarakat luas sangat berharap kepada auditor supaya dapat menjadi motor penggerak untuk mendorong terciptanya *good corporate governance* di semua sektor, baik itu di lingkungan komersial maupun lingkungan pemerintahan.
3. Khusus untuk Indonesia, negara yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi, dimana korupsi merupakan salah satu bagian dari *fraud* yang paling berdampak buruk, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang maupun produk hukum lainnya, peran auditor internal, akuntan publik, maupun auditor pemerintah sangat diharapkan dapat mendukung agenda Pemerintah Indonesia tersebut.

4. Amerika Serikat, salah satu negara yang menjadi pusat pasar modal dunia dan pusat perkembangan ilmu akuntansi, mengeluarkan *Sarbanes – Oxley Act 2002* yang mengatur tentang perlindungan investor dan reformasi akuntan publik. Undang-undang ini sangat mempengaruhi profesi auditor di dunia, termasuk di Indonesia. Undang-undang ini memiliki standar yang tinggi terhadap upaya pencegahan, pendeteksian dan pengungkapan *fraud* serta memperberat hukuman bagi auditor yang tidak profesional atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sanksi berat tersebut, auditor perlu bersikap hati-hati, tegas, waspada dan mentaati kode etik dan peraturan yang ada.
5. Lima tahun terakhir, organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, Interpol, organisasi antar negara anti *money laundering*, serta organisasi-organisasi lain yang terkait dan peduli terhadap kejahatan ekonomi sedang giat-giatnya melakukan kampanye *anti fraud*. Bahkan PBB mengeluarkan konvensi baru yakni *UN Convention against Corruption* dan sudah diratifikasi sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia lewat UU nomor 7 tahun 2006. Dengan demikian para auditor, profesi yang berkompeten di bidang ini memiliki peran yang cukup penting dalam rangka kampanye ini.

#### **5.4 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, meliputi keterbatasan jumlah sampel penelitian dimana total pengembalian yang bisa digunakan hanya 38% dari 400 kuesioner yang disebar. Juga wilayah sebaran sampel, yang belum bisa terwakili secara rata. Kemudian penelitian ini dihadapkan pada keterbatasan waktu dan biaya sehingga

perlu ada penelitian lanjutan yang lebih sempurna. Sampel Auditor Pemerintah dalam penelitian ini hanya diwakili dari BPK, sementara masih ada beberapa organisasi atau lembaga auditor pemerintah lainnya.

### **5.5 Agenda Penelitian Mendatang**

Adapun agenda penelitian mendatang yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini meliputi:

- a. Wilayah penelitian diharapkan lebih luas dan merata.
- b. Sampel penelitian untuk Auditor Internal diharapkan gabungan dari perusahaan besar dan menengah, dan mewakili sembilan sektor industri yang sudah memiliki bagian SPI atau bagian internal audit.
- c. Sampel penelitian untuk Akuntan Publik diharapkan ada keterwakilan dari luar Jawa, bahkan diharapkan merata di Indonesia.
- d. Sample penelitian untuk Auditor Pemerintah diharapkan merata meliputi auditor yang ada di BPK, KPK, BPKP, Irjen dan Bawasda.
- e. Penelitian yang akan datang perlu didukung dana dan alokasi waktu yang cukup, sehingga dapat menghasilkan data dan analisis yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), 2002, *New Fraud Audit Standard*, USA.
- American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), 2002, *Statement on Auditing Standards No 99*. USA.
- Amrizal, CFE, 2004, *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*, Jakarta.
- Anwar Nasution, 2006, *Peranan BPK dalam Mewujudkan Cita-Cita Reformasi Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta.
- Ansah Stephen Owusu et al, 2002, *An Empirical Analysis of the Likelihood of Detecting Fraud in Zew Zaeland*, Managerial Auditing Journal, MCB UPAR.
- Apostolou Barbara, et al, 2001, *The Relative Importance Management Fraud Risk Factors*, Behavioral Research in Accounting Vol 13, U S A.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – Tim Pengkajian SPKN, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD*, Jakarta.
- Bartkova Alexandra, 2005, *Fraud in Financial Reporting: Changes in Corporate Governance, Financial Reporting and Auditing Provoked After the Fall of Enron*, Comenius University, Bratislava.
- Enawati Maria, 2005, *Persepsi Auditor Internal dan Auditor Eksternal terhadap Fraud Audit dan Fraud Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan*, Indonesia.
- Erns & Young, 2006, *Fraud Survey 2006: Fraud Risk in Emerging Market*, Fraud Investigation and Dispute Service Division EY.
- Erry Riyana Hardjapamekas, 2002, *Skandal Akuntan: Kecelakaan atau Keserakahan*, Majalah Tempo, Jakarta.
- Farrell Barbara & Franco Joseph, 1999, *The Role of the Auditor in the Prevention and Detection of Business Fraud: SAS No. 82*, Western Criminology Review.
- Gallegos Frederick, CISA, CGFM, CDE, 2003, *Sarbanes-Oxley Act of 2002 and Impact on the IT Auditor. USA*



- Hery, 2005, *Persepsi Top Eksekutif (Sektor Publik dan Swasta) terhadap Fungsi Internal Audit*, Magister Akuntansi, Trisakti, Jakarta.
- Hillison, Pacini, & Sinason, 1999, *The Internal Auditor as Fraud-Buster*, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, U S A.
- Huda Santoso, CFE, 2004, *Keterkaitan Sarbanes- Oxley Act, SAS No. 99, dan Corporate Governance: Hal-Hal Apa Saja yang Perlu Kita Ketahui*, Jakarta.
- Imam Ghozali, 2005 Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- KPMJ, in Association with Paul Coram, Colin Ferguson, Robyn Moroney, 2006, *The Value of Internal Audit in Fraud Detection*, The University of Melbourne and Monash University, May 2006
- Menteri Keuangan RI - Pidato Kunci Seminar Nasional IAI-KAP, 2005, *Peningkatan Profesionalisme Akuntan Publik dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Publik*, Jakarta.
- Mohammad Abdolmohammadi, 2004, *A Comprehensive Taxonomy of Audit Task: Apendix Detailed Audit task*, U S A.
- Moyes & Hasan Iftekhar, 1996, *An Empirical Analysis of Fraud Detection Likelihood*, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, USA.
- Prasetyo, et al , Peak Indonesia, 2003, *Fraud Prevention and Investigation*, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2003, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta
- PricewaterhouseCoopers in Association with Wilmer, Cutler and Pickering, 2003, *Global Economic Crime Survey 2003*.
- Robert Tampubolon, 2005, *Risk and System Based Auditing*, Jakarta.
- Robbin, Stephen, 2005, *Organization Behavior*, Prentice-Hall, USA, terjemahan Erlangga, Jakarta
- Vanasco Rocco R., 1998, *Fraud Auditing*, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, Chicago, USA.
- The Office of the Inspector General: Massachusetts, 2004, *Fraud Prevention Program*. U S A.

Wilks Jeffrey & Zimbelman Mark, 2004, *Using Game Theory and Strategic Reasoning Concepts to Prevent and Detect Fraud*, Accounting Horizons, Vol. 18, No. 3, USA.

Ziegenfuss Douglas E., 1996, *State and Local Government Fraud Survey for 1995*, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, U S A. 1996.

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	11
Gambar 2.2 <i>Fraud Triangle</i> .....	21
Gambar 2.3 <i>The Fraud Tree</i> .....	27